



DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

F U T U R E S  K O N T R A K

BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS

BKDI Susul BBJ

Mendag Serahkan Stimulus Fiskal

Laun ming

Pasar Fisik CPO Terorganisir
Jakarta, 23 Juni 2009



CPO BBJ SIAP MERANGSAK DUNIA

SELAMAT! Dan, sekali lagi, Selamat! Apa yang berlebihan sehingga Redaksi menyampaikan kata selamat hingga dua kali? Yang pertama adalah, Bappebti pada tanggal 23 Juni 2009, ini, menerbitkan izin baru bursa berjangka komoditi. Izin bursa itu diberikan kepada PT Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI). Dan rencananya, BKDI akan memulai perdagangan berjangka untuk kontrak komoditi CPO dan emas pada bulan September 2009.



Dengan terbitnya izin BKDI, kini Indonesia memiliki dua bursa berjangka komoditi. Ini adalah awal dari sejarah besar perjalanan industri perdagangan berjangka di Indonesia. Harapannya, komoditi primer unggulan Indonesia bisa menjadi tuan di negerinya sendiri, pasar dan harga tercipta di dalam negeri.

Untuk yang kedua, kata selamat disampaikan kepada BBJ yang telah meluncurkan Pasar Fisik CPO pada 23 Juni 2009, di Hotel Four Season Jakarta. Perhelatan ini sungguh luar biasa. Karena diresmikan dua menteri sekaligus, yang seko-nyong-konyong menunjukkan keberpihakannya pada industri perdagangan berjangka komoditi. Adalah Menteri Negara BUMN Sofyan A Djalil dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, yang menjadi saksi perdagangan perdana Pasar Fisik CPO BBJ tepat pada pukul 10.00 WIB.

Pasar fisik CPO sungguh diperlukan Indonesia, mengingat Indonesia sebagai negara produsen CPO nomor satu di dunia.

Dengan demikian diharapkan pasar fisik BBJ itu mendapat dukungan dari semua pihak untuk melakukan aksi jual-beli. Sehingga nantinya harga yang terbentuk bersifat transparan dan didesiminasikan ke pasar global. Dan pada akhirnya harga itu dapat menjadi referensi bagi para pelaku pasar, demi terwujudnya cita-cita agar Indonesia menjadi salah satu barometer pasar fisik CPO dunia.

Munculnya BKDI yang akan memperdagangkan kontrak komoditi CPO dan Emas serta diluncurkannya pasar fisik CPO BBJ, Bappebti sungguh-sungguh mendorong instrumen ini berjalan mulus. Karenanya, Bappebti mengeluarkan kebijakan terbaru tentang kewajiban perusahaan pialang berjangka untuk bertransaksi minimal 5 % pada komoditi primer.

Pembaca yang budiman, pada edisi bulan Juni, ini, industri perdagangan berjangka juga diramaikan beragam hal. Mulai dari 'macet'nya urusan *single platform* hingga 'gagal'nya BBJ memiliki direktur baru.

Sampai akhir Juni ini, *single platform* memang masih berkuat dalam urusan mencari vendor. Padahal Kepala Bappebti Deddy Saleh, dalam pembahasan akhir justru sudah final ke vendor asal Inggris, Ariell. Wajar jika Bappebti kecewa ketika BBJ kembali mengajukan usulan beberapa vendor baru dari lokal. Dengan alasan pendanaan murah. Tapi konsekuensinya jadwal molor dan transparansi perdagangan tak kunjung tiba. Bagaimana selanjutnya kisah *single platform* BBJ dan pemilihan direktur baru? Kita ikuti pada edisi berikutnya. Salam! ▲

7 BERJANGKA

BBJ Lempar Handuk



16 KOMODITI

Jati, Kuat dan Bergengsi



28 KIPRAH

Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M: Pengabdian Tidak Kenal Usia



Resi Gudang 10-11
Mendag Serahkan Dana Stimulus Rp 340 Miliar

Aktualita 12-13

- BKDI Siap Susul BBJ
- Pialang Wajib Transaksi Komoditas
- Bank Century Tak Lagi Direkomendasikan Simpan Dana Margin
- Pemerintah Siap Ajukan RUU OJK

Agenda Foto 14-15

Analisa.....19

Harga Kopi Diprediksi Tetap Tinggi

Market20

- Harga Emas Meroket Tajam
- Minyak Asia Dekati Level US\$72 per Barel
- Permintaan Kakao Meningkat, Pengolahan Tersendat

Transaksi.....21

Fokus 22-23

Aturan Main Pasar Lelang Forward

Outlook 24-25

Recession's End Won't Make Investing Easier

Kolom 26-27

SRG Instrumen Penjamin Tanpa Risiko



Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi **Penasehat/Penanggung Jawab:** Deddy Saleh
Pemimpin Redaksi: Chrisnawan Triwahyuardhianto **Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Natalius Nainggolan
Dewan Redaksi: Yusuf Affandi, Lili Yuliana S, Dian Sandita Arisanti, Suhendro, Ambre Satria P, Sri Sundayani, Poppy Juliyanti
Sirkulasi: Sapin Siswantoro, Katimin **Alamat Redaksi:** Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat
www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: berbakti@bappebti.go.id



CPO BBJ

Siap Merangsak Dunia

Dream come true! PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) pada 23 Juni 2009, meresmikan pasar fisik CPO (crude palm oil) di Four Season Hotel Jakarta. Tak tanggung-tanggung dua Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, tumpang di perhelatan akbar itu. Selain itu, hadir pula sejumlah pengusaha CPO dalam negeri, pelaku perdagangan berjangka, jajaran direksi BBJ dan Kliring Berjangka Indonesia (KBI) serta sejumlah pejabat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Perdagangan perdana pasar fisik CPO BBJ ditandai dengan memencet tombol secara bersama-sama oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, tepat pada pukul 10.00 WIB sesi pertama perdagangan hari itu. Perdagangan perdana CPO BBJ di hari pertama itu mencatatkan transaksi sebanyak 2 lot (1.000 ton), dengan harga pembukaan Rp 6.621 per kg dan ditutup pada level Rp 6.946 per kg. Dengan demikian, transaksi hari perdana itu mencatatkan nilai sebesar Rp 6,95 miliar. Transaksi ini terjadi atas PTP Nusantara II dengan PT Pelita Agung Agro.

BBJ resmikan pasar fisik CPO terorganisir. Diharapkan, referensi harga segera tercipta di Jakarta, sehingga para pelaku usaha CPO tak lagi berkiblat ke Rotterdam atau pun Kuala Lumpur. Bisa!

Menteri Negara BUMN, Sofyan A Djalil mengatakan, pasar fisik CPO terorganisir diselenggarakan dengan latar belakang bahwa Indonesia saat ini merupakan produsen CPO nomor satu di dunia. Seperti diketahui, produksi CPO tahun 2008 mencapai sebesar 19,9 juta ton. Dan, diperkirakan akan meningkat pada tahun 2009 menjadi sebesar 22,4 juta ton.

"Sehingga sudah selayaknya Indonesia memiliki Pasar Fisik CPO yang Terorganisir. Dengan tujuan, selain memiliki referensi harga yang transparan, juga diharapkan Indonesia dapat menjadi salah satu referensi harga atau barometer pasar fisik CPO dunia," jelas Sofyan Djalil.

Sementara itu Mendag Mari Elka Pangestu, pun mengungkapkan, jika pihaknya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berinisiatif dan berupaya ber-

sama-sama dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)-Departemen Perdagangan dan PT BBJ untuk menyelenggarakan pasar fisik CPO yang terorganisir secara on-line dan pertama di Indonesia tersebut.

Dijelaskannya, jika CPO merupakan komoditas agroindustri yang mengambil peranan penting dalam kinerja ekspor nonmigas Indonesia. Tahun 2008, volume ekspor CPO beserta turunannya mencapai 14,29 juta ton dengan nilai 12,37 miliar dolar AS atau sekitar 11,47 persen dari total nilai ekspor non migas Indonesia. Sejak tahun 2006, Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia. Dengan terbentuknya pasar fisik CPO terorganisir secara on-line di BBJ ini, para pelaku usaha baik penjual maupun pembeli dapat melakukan transaksi secara efisien, efektif, wajar dan transparan.

Di samping itu, harga yang terbentuk di pasar tersebut diharapkan dapat menjadi harga CPO nasional yang terpadu dan sekaligus menjadi harga acuan CPO di pasar internasional. Dengan demikian, pembentukan harga yang terjadi di pasar fisik CPO akan mewujudkan adanya pasar spot komoditi CPO yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada dunia usaha.

Transaksi On-line

Dirut BBJ, Hasan Zein Mahmud menjelaskan, jika definisi yang umum digunakan untuk menggambarkan suatu kontrak berjangka adalah kontrak financial yang kinerjanya, harganya atau potensi keuntungannya tergantung pada unjuk kerja subjek komoditi yang menjadi dasar kontrak (*underlying assets*). Batasan tersebut menyiratkan bahwa peluang berhasil atau tidaknya suatu kontrak berjangka, ditentukan pula oleh kondisi pasar fisik (*spot*) yang efisien dan transparan memberi peluang yang lebih besar bagi terbentuknya pasar *derivative* yang efisien pula.

Total volume ekspor Indonesia mengisi sebesar 60 persen total perdagangan dunia. Dengan potensi produksi yang terus meningkat dengan dukungan luas kebun kelapa sawit yang mencapai 5 juta ha atau meningkat sebesar 87 persen selama 20 tahun terakhir. Prospek CPO juga cerah, mengingat kebutuhan energi alternatif berbasis sawit (*biodiesel*) dunia sangat besar. Sumbangan CPO terhadap pendapatan non migas juga terus meningkat, mencapai 7.868,54 juta dolar AS atau sebesar 8,54 persen dari pendapatan nasional. Tetapi meski kontribusinya besar di sector non migas, tetapi dalam segi pemasaran Indonesia masih kedodoran. Pasar CPO global masih mengacu pada pasar fisik Rotterdam dan pasar berjangka/*derivative* di Kuala Lumpur (MDEX) sebagai basis perhitungan harga pasar CPO dunia.

Mengingat semakin ketatnya persaingan global, maka disamping pemasaran melalui KPB-PTP Nusantara, juga dibuka kesempatan pemasaran CPO melalui BBJ. Sehingga diharapkan industri pemakai bahan baku CPO mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam kegiatan pembelian, disamping memberikan juga kesempatan pada PTP Nusantara, PT RNI dan pihak swasta untuk memasarkan produk mereka. Pasar fisik CPO di BBJ merupakan pasar fisik yang diselenggarakan oleh bursa untuk melaksanakan lelang fisik CPO secara elektronik, dengan mekanisme transaksi yang dilakukan secara on-line.

Aturan main

Dalam pasar fisik CPO, pihak penjual dapat melakukan penawaran jual sebagian (*partial*) atau melakukan penawaran jual keseluruhan (*all or none*) dengan menggunakan harga patokan jual (*price idea*) dan memfasilitasi pihak pembeli untuk dapat memberikan penawaran beli kepada pihak penjual secara elektronik. Satuan transaksi adalah 1 lot (500 ton = 500 ribu kilogram), dengan ketentuan permintaan beli atau penawaran jual hanya diperkenankan dalam 1 lot (500 ton) atau kelipatannya. Kuotasi harga pasar lokal dinyatakan dalam rupiah per kilogram termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan besar kelipatan harga adalah Rp 1. Jenis dan tempat penyerahan adalah *loco* pabrik penjual atau *free on board* (FOB) pelabuhan muat atau *franco* pabrik pemenang lelang.

Jam perdagangan setiap hari kerja mulai dari pukul 09.45 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Selama periode waktu tersebut dapat dilakukan lelang fisik minyak sawit mentah selama 45 menit. Sehingga terbagi menjadi 5 sesi, yakni dari pukul 10.00 WIB-10.45 WIB, dari pukul 11.00 WIB-11.45 WIB, dari pukul 13.00 WIB-13.45 WIB, dari pukul 14.00 WIB-14.45 WIB, dari pukul 15.00 WIB-15.45 WIB. Jam perdagangan ini dapat diubah oleh Bursa dari waktu ke waktu atas kesepakatan komite. Biaya transaksi akan ditagih (termasuk PPN) secara berkala oleh Bursa kepada peserta. Untuk setiap transaksi yang terjadi, besarnya biaya transaksi yang harus dibayar oleh penjual dan pemenang lelang, masing-masing sebesar Rp 1 (satu rupiah) per kilogram. Mutu minyak sawit mentah terdiri dari standard dan super. Mutu standar, untuk asam lemak bebas (ALB) antara 3,50 persen hingga 5,00 persen maksimum. Untuk kadar air dan kotoran (M&I) sekitar 0,50 persen maksimum. Sementara mutu super untuk ALB dibawah 3,50 persen sedangkan M&I sekitar 0,50 persen maksimum.

Pasar fisik CPO BBJ juga memiliki Komite,

yang berasal dari perwakilan pembeli dan penjual yang mewakili perusahaan atau yang ditunjuk oleh perusahaan. Jumlah anggota komite sebanyak 16 orang, terdiri dari 11 penjual dan 5 pembeli. Struktur keanggotaan komite terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua, 1 sekretaris dan 13 anggota. Tugas komite antara lain, meneliti dan memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Direksi Bursa berkaitan dengan penerimaan calon peserta. Meneliti dan memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Direksi Bursa berkaitan dengan usulan perubahan peraturan Pasar Fisik CPO, bertindak sebagai mediator jika terjadi perselisihan antar peserta, memberikan pertimbangan dan rekomendasi secara tertulis kepada Direksi Bursa mengenai tindakan yang harus diambil oleh Bursa apabila terjadi pelanggaran peraturan dan tata tertib Bursa oleh peserta dan memberikan pedoman/formula penetapan harga patokan (*price idea*) kepada peserta penjual.

Calon peserta pasar fisik CPO ini yang telah terdaftar terdiri dari 12 penjual, 6 pembeli prosesor dan 3 pembeli non prosesor. Penjual diantaranya, PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), III, V, II, I, VI, XIV, VIII, IV, XIII, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan PT Bina Karya Prima. Pembeli prosesor terdiri dari PT Bina Karya Prima, Musim Mas, Pelita Agung Agriindustri, Wilmar Nabati Indonesia, Nagamas Palmoil Lestari dan Smart Tbk. Sementara pembeli non prosesor dari PT PN III (Persero), PT PN XIV (Persero) dan PT FATH Indonesia.

Dengan adanya pasar fisik yang terorganisir ini, juga akan memudahkan baik produsen maupun konsumen pada saatnya nanti telah dipandang perlu untuk mempersiapkan pasar *derivative* sehingga dapat dilakukan pengelolaan risiko harga (*price risk management*) atas barang produksi atau barang siap serah (*deliverable stock*) dengan metodologi bisnis yang bersifat *market based approach*. ▲

Komite Pasar Fisik CPO BBJ

Setia Dharma Sebayang (Ketua/anggota)
Vimala Putra (Wakil Ketua/anggota)
Johannes Sitepu Ak (Sekretaris/anggota)

ANGGOTA: Wargani, Berani Purba, Bambang Listijono, Eddy Yanto, Gatot Bintoro, Endhang Rachmat, Natsir Tarigan, Suhardjito, Agus Purnomoo, Tanu E.T, Allan Munir, Hendra Gondawidjaja dan Fatmawati.

Kita Pun Bisa Jadi Penentu Harga

Pasar lelang fisik CPO terorganisir yang diluncurkan BBJ mendapat sambutan baik dari semua pihak. Sebagai produsen CPO terbesar di dunia, memang sudah seharusnya Indonesia memiliki bursa komoditas yang dapat menjadi salah satu acuan harga kelapa sawit dunia. Seperti diketahui, selama ini harga CPO di Indonesia selalu mengacu pada harga yang terbentuk

di Rotterdam dan bursa Malaysia. Rotterdam sendiri memang tidak memiliki bursa secara fisik, tetapi harga yang diumumkan merupakan harga yang terjadi antara pembeli dan penjual melalui broker melalui perhitungan nilai rata-rata dan pada publikasinya menggunakan jalur media massa juga terdapat gedung, pengelolaannya berikut sistem.



Mari Elka Pangestu, Menteri Perdagangan

Intinya, sebagai produsen komoditas yang besar, apa itu nomor satu, dua atau tiga, dari berbagai komoditas, memang sangat disayangkan jika kita belum juga bisa dibentuknya pasar fisik dan pasar lelang di Indonesia ini. Kita harapkan, nilai tambah dari transaksi dan produksi itu bisa dimanfaatkan oleh Indonesia sendiri. Itu sebenarnya tujuan besarnya. Dan tentunya akan lebih menguntungkan kalau kita punya system atau mekanisme yg transparan dan cepat. Jangan lupa, di Indonesia ada yang gunakan komoditas ini sebagai bahan baku turunan. Kita ingin mereka berkembang dengan harga bahan baku yang wajar. Karena itu juga kepentingan kita. Jadi bukan hanya produksi dan ekspor bahan baku mentahnya. Tapi juga memproses untuk meningkatkan olahannya. Jadi tujuan yang lebih menengah diarahkan kesitu. Tentunya juga dengan berbagai kegiatan insentif maupun kebijakan lain.



Sofyan A Djalil, Menteri Negara BUMN

Kita sudah bicara dengan Bu Mari (Mari Elka Pangestu), kita harus ciptakan mungkin insentif atau disinsentif untuk membuat orang (pihak swasta) datang ke sini (pasar fisik CPO BBJ). Tapi ini masih wacana, sebab pemberian insentif barangkali memang bukan dari kantor saya maupun kantor Bu Mari. Cuma kami bisa jadi fasilitator untuk bursa ini berkembang. Saya belum menjanjikan, tapi kami akan bicarakan ini dengan Menteri Keuangan. Apa bentuknya nanti tax insentif, sehingga orang lebih tertarik. Seperti Bursa Efek Jakarta (BEI) dulu banyak insentif yang ditawarkan pada awalnya diperkenalkan. Misalnya, perusahaan bisa go public sampai dengan 40 persen, maka akan diberikan discount 5 persen. Hal yang sama bisa dilakukan disini (BBJ). Kalau insentif bisa diperkenalkan dan kita akan upayakan, itu akan lebih mempercepat mengundang pihak lain. Tapi kalau pasar tidak berkembang, maka insentif itu tentu tidak akan terlalu atraktif diberikan.

Kita harapkan akan banyak pihak yang datang dan bertransaksi di BBJ. Tidak saja dari PTP Nusantara dari RNI. BBJ ini sudah bisa belajar banyak. Kalau sistem ini sudah jalan dan berkelanjutan, suatu saat mungkin apa yang dilakuak sama oleh KPBB (Kantor Pemasaran Bersama PTP Nusantara) sudah tidak kita butuhkan lagi. Kalau pasar sudah efektif di sini, nanti produk-produk KPBB seperti teh atau kopi bisa pindah kemari- BBJ. Tapi kita cobakan dulu first step (langkah pertama).



Deddy Saleh, Kepala Bappebti

Indonesia memiliki peluang besar dalam perdagangan komoditi. Karena kita memiliki sejumlah komoditi yang diperdagangkan di pasar internasional. Indonesia biasa menjadi negara acuan harga sejumlah komoditi primer. Seperti CPO, kakao, kopi dan lainnya. Komoditi ini tadinya sudah pernah diperdagangkan BBJ, tetapi akhirnya semuanya mental. Karena tidak ada investor yang tertarik masuk. Kita ambil contoh Brazil. Di negara ini, kontrak berjangka kopi diperdagangkan 1 lot dalam hitungan kwintal, sekitar 800 kg. mereka berhasil, transaksi harian kopi Brazil kemudian mencapai jutaan lot. Bandingkan dengan BBJ, kontrak berjangka kopi yang pernah diperdagangkan 1 lotnya 5 ton. Inilah yang membuat salah satunya investor kurang tertarik. Kita seharusnya bisa melihat contoh ini, dan bersama-sama membangun bursa. Sehingga investor asing juga bisa membeli produk kita. Kalau investor asing saja bertransaksi terhadap komoditi kita, pasti pelaku pasar yang tadinya hanya bertransaksi kontrak keuangan akan berpindah ke kontrak komoditi.

Sehingga memang kita berharap banyak dari Pasar Fisik CPO terorganisir ini. Karena ini pertama, maka kita juga harus memperhatikan berbagai hal. Seperti kelancaran system. Kelancaran sistem pada saat pelaksanaan transaksi lelang fisik CPO itu merupakan kunci untuk meraih kepercayaan pelaku pasar terutama pedagang dan pembeli dalam lelang komoditas tersebut. Kedepannya, kami juga akan mengeluarkan peraturan baru tentang kontrak fisik CPO, dimana perusahaan pialang nantinya akan diwajibkan untuk transaksi CPO minimal 5 persen.



Hasan Zein Mahmud, Dirut PT BBJ

Minyak sawit dipilih sebagai pionir, mengingat peran Indonesia sebagai produsen terbesar CPO dunia saat ini. Pada tahap awal, berangkat dari dukungan Kementerian BUMN, pasar fisik CPO ini baru akan diikuti oleh produsen milik pemerintah, selaku penjual. Namun bila mimpi untuk menjadikan Indonesia sebagai “kiblat” harga spot CPO dunia ingin diwujudkan, partisipasi produsen swasta, yang kini menguasai mayoritas pangsa pasar, merupakan suatu keniscayaan. Indonesia merupakan produsen utama dari banyak produk-produk primer.

Keberhasilan pasar fisik CPO diharapkan akan membawa efek bola salju dalam menarik produk-produk lain ke dalam program ini. Sehingga manfaat makro ekonomi yang ingin dijangkau semakin memperlihatkan magnitudnya.



Bayu Krisna Murthi, Deputy Menko Perekonomian Bidang Kelautan dan Pertanian

Secara bertahap kita memang harus bisa membangun kredibilitas harga yang terbentuk di Jakarta. Sehingga harga itu yang paling mencerminkan sawit. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga situasi sawit dunia. Tentu diawali dulu dengan mencerminkan sawit Indonesia dan karena Indonesia merupakan the biggest producer and exporter, maka situasi Indonesia itu akan sangat mempengaruhi situasi dunia.

Kalau dihitung dari jumlah, Indonesia dan Malaysia tak jauh berbeda. Jika kita ekspor misalnya 15, maka Malaysia 13. Ini dilihat dari volumenya ya. Tetapi di Malaysia ada policy, bahwa mereka tidak boleh ekspor kecuali sama perusahaan Malaysia sendiri (sister company). Praktis, CPO yang ada di pasar internasional, bagian yang sangat besar sekitar 80 persen adalah CPO Indonesia. Jadi kita sebenarnya bisa jadi penentu. Sehingga kalau kita pahami situasi Indonesia, maka akan mempengaruhi situasi dunia.

Menurut saya, referensi dalam rupiah pada pasar fisik CPO ini justru lebih sehat. Jika rupiah, maka kita bisa nikmati. Contoh Malaysia. Mereka menggunakan ringgit. Sebagai langkah challenge bagi teman-teman di bursa saya ngasih ancer-ancer per Januari 2010, penetapan harga patokan ekspor untuk sawit akan diubah atau paling tidak diusulkan untuk tidak lagi menggunakan harga Rotterdam. Tetapi harga Jakarta. Kenapa ancer-ancernya Januari, karena kita tidak mau yang terjadi adalah harga yang tidak credible atau harga ecek-ecek gitu, harga ceremony.



Setia Dharma Sebayang, Ketua Komite Pasar Fisik CPO BBJ

Anggota komite adalah perwakilan dari penjual dan pembeli. Kami berdomisili di daerah masing-masing, tetapi sekretariat kami di BBJ. Saya sendiri berasal dari PT Perkebunan Nusantara IV, Medan. Kita anggota Komite ini, ditunjuk oleh bursa untuk melakukan penelitian terhadap syarat-syarat penjual dan pembeli yang bisa ikut sebagai anggota. Kemudian ada aturan main disitu, persyaratan apa yang harus dipenuhi, sehingga seluruh perusahaan pasar fisik itu (pembeli dan penjual) betul-betul punya niat yang sungguh-sungguh. Pembeli dari luar negeri juga boleh mengikuti pasar fisik ini, sepanjang dia harus mendaftar sebagai anggota dan memenuhi persyaratan.



Derom Bangun, Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI)

Indonesia perlu belajar banyak dari pengalaman Malaysia untuk menjadi penentu harga CPO internasional. Pada tahun 1998, Malaysia mengawalinya melalui cara mematok nilai tukar mata uang ringgit terhadap dolar Amerika Serikat melalui penetapan kebijakan fixed rate. Dimana nilai tukar ringgitnya sebesar 3,8 ringgit untuk 1 dolar. Hambatan terbesar bagi BBJ sebagai penentu harga CPO internasional, adalah nilai tukar rupiah yang sangat rentan terhadap dolar Amerika Serikat. Sehingga kondisi itu menyulitkan para pembeli (buyer) CPO.

Pemerintah hendaknya lebih mengefektifkan BBJ pada perdagangan fisik komoditi primer dibandingkan sekedar perdagangan kertas berharga. Di sisi lain, BBJ perlu memberi jaminan pada buyer setelah sampai masa jatuh tempo bisa mengambil barang atau komoditas miliknya sesuai kontrak. ▲

BBJ

Lempar Handuk

Sistem perdagangan *single platform* BBJ bakal tertunda yang direncanakan digunakan pada 1 Juli 2009. Kecewa? Ya, otoritas perdagangan nampak gusar atas sikap BBJ yang terlalu penuh pertimbangan. Kocek BBJ beli sistem perdagangan itu mungkin terkuras karena mahal. Tetapi, tegaknya integritas pasar perdagangan berjangka komoditi jauh lebih mahal.



P ermintaan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) agar BBJ bermigrasi sistem perdagangan berjangka yang lebih transparan dan dapat diakses semua pihak sudah ditetapkan sejak Agustus 2008, lalu. Tapi dalam hitungan hari, sistem yang seharusnya dapat digunakan pelaku pasar tak kunjung berkesudahan. Persoalannya hanya berkuat pada memilih vendor yang siap menyuguhkan sistem terbaik mereka.

Semula ada sebanyak 5 vendor yang mengajukan proposal ke BBJ, setelah melalui tahap seleksi

tersisa 2 vendor. Dan, Bappebti pun tanpa mengintervensi kebijakan BBJ mencoba beri usul untuk menggunakan vendor yang berasal dari Inggris. Tetapi, per 15 Juni 2009, ini, BBJ kembali berkirim surat ke Bappebti. Intinya, menunda penjadwalan penggunaan sistem baru itu dan mengajukan beberapa vendor baru yang berasal dari lokal. Alias, karya anak bangsa.

Urusan single platform jadi kian panjang. Ibarat kegiatan tarik-ulur, masalah ini ternyata lebih banyak *ngulurnya* daripada *nariknya*. Sehingga yang terjadi justru perpanjangan waktu untuk proses persiapan dan akhirnya

menggencet jadwal yang telah ditentukan.

Kepala Bappebti, Deddy Saleh, mengkhawatirkan mundurnya peluncuran single platform dari waktu yang telah ditentukan. Dia juga menyatakan kekecewaannya dengan keputusan BBJ untuk mengajukan kembali beberapa vendor baru. Setelah sebelumnya Ariell, vendor yang berasal dari Inggris itu, sudah dibahas untuk digunakan. Bahkan Deddy dengan tegas menyatakan "emoh" untuk menunda lebih lama.

"Kalau mundur lagi dari target bulan Juli, saya tidak setuju! Jadi kita harus laksanakan sesuai itu.

Ya, *dong*. Saya ingin segera! Pemerintah sudah sejak Agustus tahun lalu, sampai Juni ini saja belum. Udah mau setahun. Masa saya *ngomong* terus sama wartawan, akan ada *single platform* baru. Tapi belum ada juga. Malu *dong* saya?," kata Deddy.

"Kalau BBJ tidak sanggup untuk Juli, maka saya akan tunjuk yang lain. Ini batas terakhir, tidak ada kesempatan lagi. Jadi saya sedang pertimbangkan siapa yang akan ditunjuk!" tambah Deddy.

Deddy juga membenarkan jika BBJ telah mengajukan lagi vendor baru dari lokal dengan sistem yang lain, diluar yang telah diseleksi sebelumnya. Sementara yang diusulkan ini belum diketahui sistemnya. Sebelumnya, memang ada 5 vendor. Tetapi yang telah dipresentasikan terakhir ada 2 vendor, Ariell dan Meta Trade. seharusnya, yang dipilih diantara dua tersebut.

Sudah dibahas, bahwa Ariell akan digunakan. Kenapa Ariell, karena Meta Trade tidak bisa integrasi. System itu khusus untuk system bilateral. Jadi satu persatu. Sehingga begitu digabung, berarti setiap server pedagang itu harus ada di BBJ. Jika ada 18 pedagang, maka harus ada 18 server. Suatu hal yang tidak mungkin mengingat suatu system yang diawasi justru tidak efisien.

"Kita ingin efisien dan bisa integrasi. Dan itu bisa dipenuhi Ariell. Kalau soal biaya, Ariell itu *outsourcing*. Tanpa harus mengeluarkan satu rupiah pun, karena sama dengan sistem yang digunakan pasar fisik saat ini, dimana vendor hanya akan menerima fee

berdasarkan transaksi. Tapi pada awalnya memang ini tidak gratis ya, tetap bayar. Cuma kan ini *outsourcing*?" ujarnya.

Budget murah

Sementara itu Divisi IT and Trading PT BBJ, Lukas Lauw, juga mengakui jika direksi sudah menjawab ke Bappebti dalam bentuk surat pada pertengahan Juni ini. Dimana keputusannya, BBJ akan coba implementasi dalam 3 bulan ke depan. Langkah lain yang diusulkan, memang pengajuan beberapa vendor lokal.

Menurut Lukas, usulan Ariell memang bagus. Tetapi saat proses negosiasi dengan Ariell berjalan alot. Bukan tidak lain urusannya adalah biaya. BBJ dalam mengambil keputusan ini tidak sendiri atau bukan merupakan pengambil keputusan tunggal. Jadi dalam hal ini mereka juga bicara tentang dana.

"Kita sih tidak jadi masalah untuk menggunakan vendor manapun. Hanya saja, itu tadi. Kita bicara soal dana yang akan dikeluarkan. Sehingga kita mengusulkan langkah lain. Kita contoh konsep dari Ariell tapi menggunakan vendor local," kata Lukas.

"Tapi itu pun masih harus dikembangkan lagi. Ya, ada satu atau dua vendor lokal. Tapi kita belum tunjuk. Jadi kita tunggu saja dengan sabar. Ini tanggung jawab BBJ dengan KBI, ada dua kepala yang harus disatukan. Jadi pasti butuh waktu. Yang jelas, kita punya usulan untuk menggunakan vendor lokal dengan menggunakan konsep Ariell. Kecuali, Ariell mau menerima tawaran BBJ dengan *budget* murah," tegas Lukas. ▲

Langkah Bihar Sakti Wibowo menuju kursi Direktur PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) memang tidak mudah. Meski termasuk dalam nama calon yang diajukan oleh pihak Dewan Komisaris BBJ sendiri, dan bahkan lolos uji dari pihak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), tetapi saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BBJ pada 27 Mei lalu, nama Presiden Direktur PT Jalatama Artha Berjangka itu malah kandas. Berdasarkan hasil voting (pemungutan suara), Bihar gagal mengumpulkan suara mayoritas.

Hal ini tentu saja mengundang tanda tanya besar. Bahkan Bappebti pun menyayangkan keputusan dari para pemegang saham tersebut. Apalagi dalam hal ini Bappebti menilai penambahan direktur baru memang sudah selayaknya demi menghadapi perkembangan dan kebutuhan pasar saat ini. Seperti diketahui, saat ini BBJ telah memiliki dua direktur. Yakni, Hasan Zein Mahmud sebagai Dirut PT BBJ yang bertanggung jawab di produk SPA (Sistem Perdagangan Alternatif) finansial dan indeks, sedangkan pengembangan komoditas diserahkan kepada Direktur Edi Susmadi.

Bahkan Kepala Bappebti Deddy Saleh juga khawatir jika penolakan pengangkatan Bihar sebagai direktur baru tersebut akibat prosedur yang kurang tepat dalam RUPS BBJ tersebut sehingga akhirnya melecehkan BBJ sendiri. Menurut Deddy Saleh, dugaan prosedur yang tidak benar ini, karena calon direktur yang ditolak RUPS tersebut berasal justru dari pihak BBJ sendiri. Akan menjadi

Direktur Baru BBJ Dikocok Ulang?

Perkembangan perdagangan berjangka komoditi BBJ dewasa ini, menuntut ada ‘tenaga baru’ selaku direktur. BBJ pun mengajukan 5 nama calon direktur baru untuk diuji Bappebti. Setelah melalui *fit and proper test*, Bappebti memilih calon direktur dengan nama Bihar Sakti Wibowo. Tetapi kemudian diranah RUPS BBJ, Bihar justru tak direstui, dan dihasilkan keputusan kocok ulang memilih direktur baru. Agaknya, keputusan RUPS ini kontra produktif dengan perkembangan BBJ.

berbeda kondisinya apabila calon yang diajukan berasal dari Bappebti, sehingga wajar jika ada penolakan.

Pengajuan daftar calon direktur BBJ itu disampaikan kepada Bappebti melalui surat Dewan Komisaris BBJ No. L/BBJ/DEKOM/04-09/009 tanggal 23 April 2009 tentang Daftar Calon Direksi PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Sementara persetujuan satu calon direktur yang diajukan pihak pemegang saham BBJ diatur dalam surat keputusan Kepala Bappebti No. 12/BAPPEBTI/5/2009.

Menurut Direktur BBJ Edi Susmadi, secara undang-undang memang belum ada yang mengatur tegas apakah keputusan Bappebti itu merupakan proses pemilihan terakhir. Atau masih perlu ditetapkan lagi dari keputusan para pemegang saham. Yang jelas, dalam aturan BBJ,

direktur itu harus berdasarkan hasil keputusan RUPS. Tetapi karena belum ada aturan tertulis yang jelas tadi, maka BBJ akan menggelar RUPS kembali sekitar bulan Oktober 2009, ini. Kedepannya, akan membentuk tim perwakilan dari para pemegang saham. Karena memang BBJ membutuhkan satu lagi direktur baru.

Merunut kembali proses penolakan terhadap Bihar, Edi Susmadi menjelaskan, jika mekanismenya memang calon itu harus diajukan pihak pemegang saham. Direksi justru tidak memiliki kewenangan. Kemudian prosedurnya adalah *fit and proper test*, yang kemudian Bappebti akhirnya waktu itu memilih Bihar.

“Kemudian kita mengadakan RUPS. Jika waktu RUPS semua pemegang saham mengadakan dulu persetujuan secara aklamasi.

Artinya dalam jumlah yang telah datang memenuhi forum, bahwa kalau sudah setuju maka diterima. Tetapi waktu diadakan aklamasi, persentasenya banyak yang tidak setuju,” kata Susmadi.

Jumlah pemegang saham 29, dan yang hadir lebih kurang 21 pemegang saham. Dan 50 persen menolak. Karena tidak tercapai aklamasi, maka mekanismenya diadakan voting. Saat itu yang setuju ada 10, sementara 6 tidak. Kalau tidak salah ada sekitar 4 yang abstain. Karena dari aklamasi dan voting tidak tercapai, maka ditolaklah saudara Bihar ini oleh para pemegang saham, tambahnya.

Sementara itu, Deddy Saleh, mengaku belum menerima daftar nama-nama calon direktur baru yang rencananya akan kembali diajukan BBJ. Dia pun membenarkan jika selama ini memang belum ada aturan tertulis mengenai mekanisme pemilihan calon direktur BBJ tersebut. Sehingga yang akan datang rencananya akan segera dibuat peraturan tersebut. Dimana seleksi pertama dari BBJ, kemudian melewati keputusan final melalui *fit and proper test* Bappebti.

“Sehingga siapa pun yang nanti kita pilih akan bisa diterima. Jadi tidak ada penolakan seperti sekarang. Mereka ajukan, kita pilih, lalu ditolak. Logikanya kan, kalau calon dari mereka maka semua bisa diterima. Kalau memang tidak bisa diterima, kenapa tidak ditolak dari awal dianya (Bihar)?” ujar Deddy. ▲

Mendag Serahkan Dana Stimulus Rp 340 Miliar

Departemen Perdagangan akhirnya mengucurkan dana stimulus fiskal untuk pembangunan infrastruktur pasar tradisional dan gudang pangan. Nilai dana stimulus fiskal yang berasal dari APBN 2009 untuk dua sektor itu sebesar Rp 340 miliar. Masing-masing untuk pembangunan pasar tradisional sebesar Rp 215 miliar, sedangkan untuk pembangunan gudang pangan dalam mendukung sistem resi gudang (SRG) sebesar Rp 125 miliar.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, pada tanggal 27 Mei 2009 di Gedung Departemen Perdagangan, menyerahkan dana stimulus fiskal itu secara simbolik kepada 47 aparat pemerintah daerah kabupaten-kota.

Dana stimulus fiskal merupakan program pemerintah untuk merespon krisis global yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan likuiditas agar sektor riil agar dapat tetap bergerak lebih cepat. Oleh karena itu, program ini mendapat perhatian yang luas dari masyarakat. Sehingga, dalam pelaksanaannya diperlukan keseriusan dan tentunya pengawasan dari semua pihak. Agar dana yang telah dialokasikan oleh pemerintah itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk tujuan yang telah ditentukan.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dalam sambutannya penyerahan dana stimulus fiskal itu mengatakan, pembangunan pasar tradisional ditujukan untuk meningkatkan daya saing dan memberdayakan pasar tradisional. "Hal ini memang mengundang polemic, terutama di kota besar yang telah banyak ditemukan pasar modern. Kita bukan mau menutup pasar modern, tetapi bagaimana kita meningkatkan daya saing dan memberdayakan pasar tradisional," jelas Mari.

Pada saat ini sebagian besar

perdagangan yang melaksanakan untuk bahan pokok dan makanan segar itu tetap melakukannya di pasar tradisional. Sehingga inilah yang harus kita pertahankan, tambahannya.

"Banyak lagi keuntungan yang diperoleh dari pasar tradisional, dibandingkan dengan pasar yang modern. Harga lebih murah, barang lebih segar, lokasi yang lebih dekat. Dan aspek budayanya yang bahwa kita masih bisa tawar-menawar. Masih ada interaksi antara pembeli dan penjual, ini juga aspek-aspek yang penting. Dengan demikian, sejak beberapa waktu lalu kita berjuang untuk melahirkan suatu konsep yang bisa diimplementasi bersama dengan daerah. Yaitu bagaimana membangun pasar tradisional bisa bersaing dengan pasar modern," kata Mari.

"Kita bisa memperoleh hal-hal yang baik dari pasar modern seperti, nyaman, dan juga barangnya juga tersedia dengan baik. Dan ini yang antara lain kita lakukan di dalam negeri, yakni meningkatkan daya saing atau pemberdayaan pasar tradisional dalam meningkatkan lapangan pekerjaan."

Kembangkan SRG

Lebih jauh dikatakan Mari Pangestu, kita dulu sudah membuat semacam cetak biru distribusi di dalam negeri, terutama komoditas-komoditas yang segar dan masuk ke pasar. Itu merupakan suatu jaringan dari pasar induk, pasar penunjang sampai dengan

ke pasar eceran. Dan bagaimana kita juga menjamin kualitas dari pada produk-produk pertanian.

"Jadi gudang juga menjadi sarana yang penting, oleh karena itu memperoleh dari dana stimulus. Untuk pembangunan gudang, ada juga tujuan-tujuannya seperti yang telah saya sampaikan tadi, yakni untuk memperbaiki hasil pasca panen dan terselenggaranya sistem resi gudang secara optimal," jelas Mari.

Dikatakan Mari, pemerintah pusat sungguh berharap bagi daerah-daerah yang berhasil mendapatkan dana stimulus untuk pembangunan gudang juga memfokuskan diri. Bukan hanya membangun gudang itu secara fisik, tetapi mengembangkan sistem resi gudang yang sudah ada aturannya dan lain sebagainya.

"Kita sangat berharap dengan demikian kita dapat meningkatkan mutu komoditi pertanian sehingga bisa bersaing, dan juga meningkatkan penyerapan hasil panen dari para petani yaitu komoditi beras, gabah dan jagung."

Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian terkait dengan lokasi, kecepatan dari lokasi berkaitan dengan kedekatannya atau aksesnya dari sentra produksi. Dan yang penting lagi, tanah tidak bermasalah atau bersertifikat. Tepat waktu pembangunan, selesai sesuai jadwal, November 2009.

Gudang standar

Sesuai Standar SNI, bangunan gudang untuk komoditi pertanian mengacu SNI 7331. Menurut SNI 7331, pembangunan gudang yang benar prosedur pelaksanaannya adalah tertib administrasi keuangan dan ada pertanggungjawaban, bermanfaat dan tepat sasaran dalam mendukung implementasi sistem resi gudang.

Dan gudang diutamakan untuk petani, kelompok tani, gapoktan dan koperasi. Melakukan penyiapan daerah dalam rangka pelaksanaan SRG tahun 2010 melalui penyiapan anggaran pendampingan, melakukan sosialisasi SRG, pengadaan perlengkapan gudang seperti dryer, penyiapan kelembagaan SRG, seperti pengelola gudang, lembaga penilaian kesesuaian, asuransi, dan lembaga keuangan. Dan menyelenggarakan pelatihan SRG, stakeholder, mengenai pengelolaan

Gudang Pangan Skema SRG

Bappebti selaku unit Departemen Perdagangan yang membina dan mengawasi Sistem Resi Gudang (SRG), memprioritaskan pembangunan gudang pangan dari dana stimulus fiskal tahun 2009 untuk komoditi gabah, beras dan jagung. Pembangunan gudang pangan itu tersebar di 9 provinsi atau di 34 kabupaten-kota, dan menyerap dana sebesar Rp 120 miliar. Dari total Rp 120 miliar dana stimulus pembangunan gudang, masing-masing daerah diperkirakan mendapat Rp 2,5 miliar.

Kepala Bappebti Deddy Saleh, mengatakan, pembangunan gudang

yang kita sarankan dibangun Pemda berbentuk gudang flat untuk komoditi gabah dan beras. Sedangkan untuk komoditi jagung, gudang yang dibangun berbentuk silo.

"Kami pikir, dari dana yang diperoleh cukup untuk membangun gudang dan dapat dikelola secara komersial. Dan yang terpenting, pengelola gudang harus yang profesional dan mendapat izin dari Bappebti," ujar Deddy.

Pengelola gudang nantinya akan ditraining untuk pengelolaan administrasi dan sebagainya. Karena itu terkait dengan sistem yang kita bangun secara

nasional. Setiap pengelola gudang juga harus online dengan pusat registrasi di Jakarta. Yang bisa diakses bank secara on-line, tambahannya.

Dari sisi kepemilikan gudang, pemerintah daerah dapat menunjuk pihak swasta yang berbadan hukum, atau koperasi dan bisa juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Jadi kalau Bapak/Ibu punya perusahaan daerah, bisa menjadi pengelola gudang. Dan ini menjadi sumber pendapat daerah dari restribusi. Tetapi pungutan yang dikenakan harus terjangkau petani," demikian dikatakan Deddy Saleh, dihadapan bupati dan walikota penerima dana stimulus fiskal 2009. ▲

gudang, inspeksi gudang, dan informasi resi gudang.

"Kita tidak saja membangun gudang secara fisik, tetapi harus berguna sesuai dengan tujuannya. Tentunya harus sesuai dengan tepat lokasi. Dan dikelola dengan baik, dibangun seauai standard agar benar-benar membantu petani."

Beberapa catatan yang kami harap sesuai dengan perencanaan, harusnya sudah dipikirkan sejak sekarang, saat ini kita sudah masuk ke dalam pelaksanaannya dan implementasinya. Kita harap selesai tepat waktu. Terutama ini merupakan dana stimulus. Karena dana stimulus memang, tujuannya untuk memberi stimulasi kita harapkan kuartal II sudah mulai. Tetapi dalam menghadapi keterlambatan pencairan DIPA, ya, kuartal III itu sudah bisa dirasakan, kata Mari.

"Jadi untuk bisa memberikan stimulasi kepada pertumbuhan dan mengatasi kemiskinan, itulah berbagai catatan dan harapan kami. Sehingga diharapkan semua dapat bekerja sama dan juga saling memberi masukan. Dan kita terus berharap agar tetap mendapat tambahan anggaran untuk pembangunan pasar maupun gudang di masa mendatang. Karena memang jumlah pasar dan gudang yang perlu dibangun sangat banyak. Tentunya daerah-daerah yang telah menunjukkan kinerja yang baik, itulah juga yang jadi kawasan percontohan. Juga membantu daerah lain dan semoga bisa mendapat dana tambahan, walaupun dalam pembahasan di DPR, dana stimulus dianggap tidak merata. ▲

DAERAH PENERIMA DANA STIMULUS FISKAL 2009

Provinsi Nanggro Aceh Darussalam

1. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pidie Jaya

Provinsi Sumatera Barat

1. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok
2. Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Tanah Datar
3. Dinas Koperasi Perdagangan Industri dan UKM Kabupaten Pasaman Barat

Provinsi Jawa Barat

1. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur
3. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut
4. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor
5. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Investasi Kabupaten Sumedang
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kuningan
7. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang
8. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka

Provinsi DIYogyakarta

1. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul

Provinsi Jawa Tengah

1. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak
2. Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara
4. Dinas Koperasi UMKM Industri dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan
5. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Banjarnegara

Provinsi Jawa Timur

1. Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo
4. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Nganjuk
5. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang
6. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Sampang
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun
8. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Sumenep

Provinsi Kalimantan Barat

1. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Kuala

Provinsi Sulawesi Selatan

1. Dinas Koperasi UKM Pasar Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa Selatan
2. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gowa
3. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidrap
5. Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone

Provinsi Gorontalo

1. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo

BKDI Siap Susul BBJ

Bappebti terbitkan izin usaha bursa berjangka baru yakni PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI).

Di tengah sulitnya likuiditas transaksi perdagangan berjangka komoditi primer di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), sebuah kelompok usaha berbasis komoditi emas dan crude palm oil (CPO) mengajukan permohonan pendirian bursa berjangka baru pada 25 Agustus 2008. Dan setelah melalui proses yang cukup panjang, Bappebti pada tanggal 23 Juni 2009 menerbitkan izin bursa berjangka PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia

(BKDI). Keputusan Kepala Bappebti itu diterbitkan dengan No.26/BAPPEBTI/KP/6/2009.

Dengan terbitnya izin bursa berjangka komoditi itu, saat ini di Indonesia terdapat dua bursa berjangka komoditi yakni BBJ dan BKDI. Dan, dalam operasionalnya BKDI akan bekerjasama dengan Identrust Security International yang bertindak sebagai Lembaga Kliring Berjangka. Namun, saat ini izin usaha lembaga kliring baru itu masih dalam proses di Bappebti.

BKDI yang beralamat di Jalan Letjen S. Parman Kavling No. 73 Suite A Jakarta, ini, menurut rencana akan beroperasi pada bulan September 2009. Dalam perdagangan perdana, BKDI akan menawarkan kontrak berjangka komoditi CPO dan Emas.

Dalam kepengurusan BKDI, terdapat nama-nama sebagai berikut, Direktur Utama Megain Wijaya dan satu orang Direktur Arwadi J. Setiabudi. Sedangkan sebagai dewan komisaris terdapat nama Fenny Widjaya sebagai Komisaris Utama, Dibyo Widodo, Hasanudin Massaile, Reymond Laksmanadi Kristiadi sebagai Komisaris. ▲

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 69/Bappebti/Per/6/2009 Tentang Penggerak Pasar (Market Maker) dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka pada 23 Juni 2009.

Peraturan ini diantaranya memuat tentang kewajiban Pialang Berjangka dan Penyelenggara SPA untuk melakukan transaksi multilateral di Bursa Berjangka minimal 5 persen dari total transaksi kontrak berjangka setiap bulan. Kewajiban ini akan mendorong Pialang Berjangka dan Penyelenggara SPA melakukan transaksi kontrak berjangka secara multilateral di Bursa Berjangka sehingga likuiditas Bursa Berjangka diharapkan dapat meningkat.

Selain itu, pihak yang bersedia menjadi Penggerak Pasar diberikan berbagai insentif diantaranya dikecualikan dari

Pialang Wajib Transaksi Komoditas

kewajiban melakukan jumlah minimum total transaksi kontrak berjangka sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti dimaksud. Jumlah minimum total transaksi yang wajib dilakukan oleh Pialang Berjangka adalah 3.500 (tiga ribu lima ratus) lot setiap bulan. Sedangkan jumlah minimum total transaksi yang wajib dilakukan oleh Penyelenggara SPA adalah 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) lot setiap bulan. Penetapan jumlah minimum total transaksi ini juga bertujuan untuk mencegah Pialang Berjangka dan Penyelenggara SPA yang tidak mampu menutupi biaya operasional perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Nasabah.

Pengaturan tentang

tersedianya Penggerak Pasar (*Market Maker*) di Bursa Berjangka dan adanya kewajiban melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan volume perdagangan Kontrak Berjangka dan likuiditas perdagangan di Bursa Berjangka. Peraturan ini memberikan kesempatan kepada Pedagang Berjangka, dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif untuk menjadi Penggerak Pasar (*market maker*) di Bursa Berjangka. Prosedur penetapan Penggerak Pasar (Market Maker) selanjutnya diatur oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka setelah mendapat persetujuan dari Bappebti. ▲

Bank Century Tak Lagi Direkomendasikan Simpan Dana Margin

Bank Century yang saat ini masuk dalam Lembaga Penjaminan Pemerintah (LPS), setelah mengalami krisis likuiditas tak lagi direkomendasikan sebagai bank penyimpan margin dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi. Meski demikian, izin Bank Century yang ditunjuk sebagai bank penyimpan dana margin pada tahun 2005 belum dicabut oleh Bappebti.

Menurut Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia, Surdiyanto Suryodarmodjo, baik anggota kliring maupun para investor dari perusahaan pilang berjangka sudah tidak direkomendasikan lagi untuk menyetor dana margin ke Bank Century. Hal itu karena menyangkut kredibilitas.

"Saya pikir, kalau manajemen Bank Century masih mau mempertahankan izin bank penyimpan dana margin, manajemen harus lakukan *rebranded*. Karena namanya sudah terlanjur buruk, dan nasabah pasti tidak akan mau bertransaksi lewat bank tersebut," katanya.

Menurut Surdiyanto, dana margin nasabah perdagangan berjangka yang masih tersimpan di Bank Century kurang dari Rp 1 miliar. Itu pun dalam waktu dekat akan ditarik dan dipindahkan ke bank lainnya. "Semula Bank Century mengelola dana margin dari pelaku perdagangan berjangka mencapai Rp 70 miliar. Tetapi setelah terjadi kasus itu kami tak lagi merekomendasikan," tambahnya.

Bank Sinar Mas

Bank Sinar Mas adalah pendatang baru penyimpan dana margin. Hal

itu setelah Bappebti mengeluarkan surat persetujuan sebagai bank penyimpan dana margin, dana kompensasi dan dana jaminan dalam perdagangan berjangka komoditi. Surat persetujuan itu dikeluarkan Bappebti tertanggal 30 Maret 2009, dengan No. 09/Bappebti/SP/3/2009.

Penyerahan surat persetujuan

Bank Sinar Mas sebagai bank penyimpan dana margin perdagangan berjangka baru dapat dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2009. Penyerahan surat persetujuan itu langsung diserahkan Kepala Bappebti Deddy Saleh kepada Presdir Sinar Mas, Tjendrawati Widjaja.

Dengan masuknya Bank Sinar Mas sebagai bank penyimpan dana margin perdagangan berjangka komoditi, tercatat sudah sebanyak empat bank yang disetujui Bappebti, masing-masing, Bank Central Asia, Bank CIMB Niaga, Bank Century dan Bank Sinar Mas. ▲

Pemerintah Siap Ajukan RUU OJK

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, pemerintah bakal menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhir bulan Juni, ini, kepada DPR-RI. Untuk itu, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus melakukan komunikasi mencari input format seperti apa yang terbaik.

Sri Mulyani, menambahkan, RUU akan diserahkan kepada DPR setelah pemerintah menyelesaikan harmonisasi RUU. Karenanya, ia belum dapat menjawab OJK merupakan lembaga baru atau tidak. Meski demikian bentuk persiapan pendirian OJK sudah dilakukan seperti amanat dari UU BI. Pemerintah juga mulai menyiapkan sumber daya manusia (SDM). Sebagai langkah awal sejumlah staf Bapepam-LK untuk ditingkatkan kualitas kemampuannya. Tidak hanya SDM, imbuhnya, pemerintah juga mulai menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung OJK.

Salah satu perhatian utama pemerintah saat ini adalah sikap DPR terhadap RUU OJK yang segera memahasnya. Ini menjadi masalah besar karena DPR yang ada saat ini akan segera menyelesaikan masa tugasnya pada Oktober 2009. Oleh karena itu, ada risiko RUU OJK tidak akan selesai pada masa sidang 2009.

"Kami akan terus melakukan proses itu. Namun, persoalannya, masa jabatan Dewan selesai Oktober 2009. Pertanyaannya, apakah semua UU yang tidak selesai akan di carry over (dialihkan ke tahun 2010). Itu keputusan yang harus dibuat Dewan. Kalau dari pemerintah, saya maunya dilanjutkan lagi karena sayang sudah masuk ke DPR," ujar Sri Mulyani. ▲

► **Agenda FOTO** ◀



Kepala Bappebti, Deddy Saleh memberi sambutan pada penyerahan persetujuan Bank Sinar Mas sebagai bank penyimpan margin perdagangan berjangka. Surat persetujuan diterima Direksi Bank Sinar Mas Tjendrawati Wijaya. Jakarta 17 Juni 2009.

Ketua Asbanda Winny E Hasan dan Kepala Bappebti, Deddy Saleh dalam sambutan sosialisasi Sistem Resi Gudang untuk kalangan Bank Pembangunan Daerah. Jakarta, 17-18 Juni 2009.



Pelatihan Sistem Resi Gudang untuk Senior Banker atau bagian pemasaran dan manajemen resiko kredit, diikuti 27 peserta yang berasal dari berbagai bank pemerintah maupun swasta seperti BRI, BCA, OCBC NISP, HSBC, DBS Indonesia, Agroniaga, Rabobank, Bank Ekspor Indonesia, BII, Bank Mega, Chinatrust Indonesia, Bank Mandiri, Permata Bank, BNI, CIMB Niaga, Bukopin dan Standard Chartered Bank. Kuta - Bali, 9-11 Juni 2009.



Kepala Bappebti melakukan Dialog Interaktif Perdagangan Berjangka Komoditi di RRI dan TVRI Medan, 25 Mei 2009.



Pelatihan simulasi pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Batam, 31 Mei 2009.



Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, menyerahkan secara simbolik dana stimulus fiskal pasar dan gudang kepada bupati dan walikota dari sejumlah daerah. Dana stimulus pasar disalurkan sebesar Rp 215 miliar, dan untuk gudang pangan sebesar Rp 125 miliar. Jakarta 27 Mei 2009.



Sosialisasi Sistem Resi Gudang di Palangkaraya - Kalimantan Tengah, 19 Mei 2009.



Jati, Kuat dan Bergengsi



*Kayu jati (*tectona grandis*), selama ini dikenal sebagai jenis kayu yang kuat dan awet. Karena kualitasnya tersebut, kayu ini menjadi bernilai ekonomi tinggi. Terutama untuk urusan mebel atau furniture, kayu jati termasuk dalam klasifikasi barang mewah dan paling digemari. Pada zaman dulu, jati juga dikenal sebagai bahan pembuat kapal atau dok yang tak tertandingi. Bahkan karena pesona si jati ini, pihak VOC sampai jatuh hati. Dan nekad “main hati” dari sebelumnya hanya berdagang rempah, lalu latah ikut jualan jati.*

Pohon penghasil kayu bermutu tinggi ini sebenarnya berasal dari Burma. Tetapi dalam perkembangannya kemudian menyebar ke Semenanjung India, Muangthai, Filipina, dan Jawa. Burma menjadi produsen jati terbesar saat ini, dengan menyumbang pasokan sekitar 70 persen dari kebutuhan jati dunia yang berasal dari hutan jati alami. Sementara sekitar 30 persen sisanya dipasok dari hutan tanaman jati di India, Thailand, Jawa, Srilanka, dan Vietnam. Jati telah lama dikembangkan sebagai hutan tanaman di berbagai negara di Asia, seperti juga di Srilangka (sejak 1680), Tiongkok (awal abad ke-19), Bangladesh (1871), Vietnam (awal abad ke-20), dan Malaysia (1909).

Jati juga memiliki nama lain, yakni teak (Inggris), berasal dari kata *thekku* dalam bahasa Malayalam, bahasa di negara bagian Kerala di India selatan. Jati menyebar luas mulai dari India, Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, Indochina, sampai ke Jawa. Di wilayah Pulau Jawa, jati ditanam oleh orang-orang Hindu sejak ribuan tahun silam. Selain wilayah-wilayah yang telah disebutkan diatas, jati juga dikembangkan di luar daerah penyebaran alaminya. Di Afrika tropis, Amerika tengah, Australia, New Zealand, Pasifik dan Taiwan.

Kita telah lama mengenal jati sebagai bahan pembuat meja, kursi, jendela, pintu dan industri kerajinan lainnya yang bernilai tinggi. Kualitas jati memang mumpuni, sehingga meski harganya tinggi tetap digemari. Tetapi mungkin tidak banyak yang tahu jika jati juga pernah menjadi bahan baku andalan untuk pembuat kapal dan dok pelabuhan, sebelum posisinya digantikan bahan logam. Jati juga memiliki nilai lain dalam kegunaannya. Kayu jati jawa telah dimanfaatkan sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jati terutama dipakai untuk

membangun rumah dan alat pertanian. Sampai dengan masa Perang Dunia II, orang Jawa pada umumnya hanya mengenal kayu jati sebagai bahan bangunan.

Tetapi sekitar abad ke-17, masyarakat Sulawesi Selatan juga menggunakan akar jati sebagai penghasil pewarna kuning dan kuning coklat alami untuk barang anyaman mereka. Sementara masyarakat Pulau Bawean menyeduh daun jati untuk menghasilkan bahan pewarna coklat merah alami, di Lamongan tumbukan daun muda jati diseduh, dan di Pulau Madura tumbukan daun jati dicampur dengan asam jawa. Dan memang, pada masa itu, pengidap penyakit kolera pun dianjurkan untuk meminum seduhan kayu dan daun jati yang pahit sebagai penawar sakit.

Bukan hanya kayunya, daun jati juga dimanfaatkan secara tradisional di Jawa sebagai pembungkus, termasuk pembungkus makanan. Nasi yang dibungkus dengan daun jati terasa lebih nikmat. Contohnya adalah nasi jambalang yang terkenal dari daerah Jambalang, Cirebon. Daun jati juga banyak digunakan di Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai pembungkus tempe. Konon, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan semakin menambah cita rasa unik dan istimewa. Ranting-ranting jati yang tak lagi dapat dimanfaatkan untuk mebel, dimanfaatkan sebagai kayu bakar kelas satu. Kayu jati menghasilkan panas yang tinggi, sehingga dulu digunakan sebagai bahan bakar lokomotif uap.

Itu baru bicara urusan kayu, daun dan rantingnya. Tetapi mungkin kita juga baru tahu jika banyak jenis serangga hama jati juga sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan orang desa. Seperti belalang jati (Jw. walang kayu), yang besar berwarna kecoklatan, dan ulat-jati (*Endoclieta*). Ulat jati bahkan sering dianggap

makanan istimewa karena kelezatannya yang luar biasa. Ulat ini dikumpulkan menjelang musim hujan, di pagi hari ketika ulat-ulat itu bergelantungan turun dari pohon untuk mencari tempat untuk membentuk kepompong (Jw. unkrung). Kepompong ulat jati pun turut dikumpulkan dan dimakan. Dan konon, siapa pun yang telah menyantap mahluk-mahluk “penghuni” pohon jati, dipastikan tidak akan mampu menahan diri untuk mengulangi menyantapnya lagi.

Orang mengenal wujud jati sebagai pohon berukuran besar, berbatang lurus, dapat tumbuh mencapai ketinggian antara 30 hingga 40 meter. Jati tumbuh di hutan-hutan gugur, yang menggugurkan daun di musim kemarau. Daun umumnya besar, bulat



telur terbalik, berhadapan, dengan tangkai yang sangat pendek. Daun pada anakan pohon berukuran besar, sekitar 60-70 cm x 80-100 cm; sedangkan pada pohon tua menyusut menjadi sekitar 15 x 20 cm. Berbulu halus dan mempunyai rambut kelenjar di permukaan bawahnya. Daun yang muda berwarna kemerahan dan mengeluarkan getah berwarna merah darah apabila diremas. Ranting yang muda berpenampang segi empat, dan berbonggol di buku-bukunya.

Batangnya bebas cabang (clear bole) dapat mencapai 18-20 m. Pada hutan-hutan alam yang tidak terkelola ada pula individu jati yang berbatang bengkok-bengkok. Sementara varian jati blimbing memiliki batang yang berlekuk atau beralur dalam; dan jati pring (Jw., bambu) nampak seolah berbuku-buku seperti bambu. Kulit batang coklat kuning keabu-abuan, terpecah-pecah dangkal dalam alur memanjang batang.

Pohon ini juga dapat tumbuh menjadi begitu besar dan bertahan selama ratusan tahun. Namun, pohon jati rata-rata mencapai ketinggian 9-11 meter, dengan diameter 0,9-1,5 meter. Pohon yang berkualitas adalah yang memiliki ciri bergaris lingkaran besar, berbatang lurus, dan sedikit cabangnya dengan usia sekitar 80 tahun. Bunga majemuk terletak

dalam malai besar, 40 cm x 40 cm atau lebih besar, berisi ratusan kuntum bunga tersusun dalam anak payung menggarpu dan terletak di ujung ranting; jauh di puncak tajuk pohon. Tajuk mahkota 6-7 buah, keputih-putihan, 8 mm. Berumah satu. Buah berbentuk bulat agak gepeng, 0,5 – 2,5 cm, berambut kasar dengan inti tebal, berbiji 2-4, tetapi umumnya hanya satu yang tumbuh. Buah tersungkup oleh perbesaran kelopak bunga yang melembung menyerupai balon kecil.

Iklim yang cocok adalah yang memiliki musim kering yang nyata, namun tidak terlalu panjang, dengan curah hujan antara 1200-3000 mm pertahun dan dengan intensitas cahaya yang cukup tinggi sepanjang tahun. Ketinggian tempat yang optimal adalah antara 0 – 700 m dpl; meski jati bisa tumbuh hingga 1300 m dpl.

Tanah yang sesuai adalah yang agak basa, dengan pH antara 6-8, sarang (memiliki aerasi yang baik), mengandung cukup banyak kapur (Ca, calcium) dan fosfor (P). Jati tidak tahan tergenang air.

Pohon jati di tanah air berhasil dikembangkan juga di beberapa daerah. Selain di Jawa dan Muna, jati juga dikembangkan di Bali dan Nusa Tenggara. Meski ada juga upaya penanaman di beberapa wilayah lain yang



hasilnya tidak begitu memuaskan. Seperti saat ditanam di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan, jati mati setelah berusia dua atau tiga tahun. Dapat dimaklumi karena tanah di daerah tersebut memang sangat asam, sehingga kurang cocok untuk proses tumbuh kembang jati. Jati merupakan tumbuhan yang memerlukan zat kalsium dalam jumlah besar, juga zat fosfor dan cahaya matahari. Saat ini selain Jawa, hutan jati juga ada secara terbatas di beberapa tempat di Pulau Sulawesi, Pulau Muna, daerah Bima di Pulau Sumbawa, dan Pulau Buru. Jati berkembang juga di daerah Lampung di Pulau Sumatera.

Dalam sejarah, tercatat pola pengembangan pohon jati ini. Berdasarkan laporan Heyne sekitar tahun 1671, jati

ditemukan di beberapa wilayah di bagian timur Sulawesi. Jumlahnya sekitar 7.000 ha di Pulau Muna dan 1.000 ha di pedalaman Pulau Butung di Teluk Sampolawa. Heyne saat itu memperkirakan jika jati di wilayah tersebut juga terdapat pula di Pulau Kabaena, serta di Rumbia dan Poleang, di Sulawesi Tenggara. Dan analisis DNA mutakhir menunjukkan bahwa jati di Sulawesi Tenggara merupakan cabang perkembangan jati Jawa. Jati yang tumbuh di Sulawesi Selatan baru ditanam pada masa 1960an dan 1970an. Ketika itu, banyak lahan di wilayah Billa, Soppeng, Bone, Sidrap, dan Enrekang sedang dihutankan kembali. Di wilayah Billa, pertumbuhan pohon jatinya saat ini tidak kalah dengan yang ada di Pulau Jawa, dengan garis tengah batang dapat melebihi 30 cm.

Selain itu, laporan perjalanan Raffles 1817 juga mencatat jika jati hanya tumbuh subur di Jawa, Madura, Bali dan Sumbawa. Tetapi jati justru tidak terlihat di wilayah Semenanjung Malaya atau Sumatera dan sekitarnya. Menurut Raffles, sekitar abad ke-15 dan ke-16, hutan jati yang terdekat dengan Jawa dan Kepulauan Sunda Kecil berada di Siam dan Pegu, negeri-negeri yang pernah mengeksport barang ke wilayah Jawa. Perkiraan-perkiraan selanjutnya juga diungkapkan berdasarkan banyak hal, termasuk jarak antar pohon yang cenderung beraturan. Sehingga Altma pada 1922 memperkirakan bahwa hutan jati di Jawa mungkin merupakan hasil penanaman di akhir era Hindu (abad ke-14 hingga ke-16). Ia menduga jika penguasa Jawa masa itu telah menganggap jati sebagai suatu pohon suci. Mereka lantas mengimpor jenis pohon itu dari Kelinga di pantai timur India Selatan sejak abad kedua. Jati memang banyak ditemukan di sekitar candi-candi untuk menghormati Dewa Siyuwa.

Hanya saja perkiraan tersebut terbantahkan dari peneliti lain. Menurut Simatupang (2000) melihat jika jati telah menyebar jauh lebih luas. Ia menduga penyebaran yang lebih luas ini berkat keterlibatan para petani sekitar candi. Para petani itu sudah melihat kegunaan jati dan budidaya yang mudah. Simatupang menduga bahwa, di tempat-tempat tertentu di Jawa yang tidak cocok untuk persawahan, perladangan berpindah dipraktikkan. Perladangan berpindah adalah cara bertani yang biasa dilakukan semasa itu di banyak daerah lain di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Tetapi sebelum berpindah ladang, petani-petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur mungkin telah menanam pohon jati. Karena tanaman ini cocok dengan iklim kering setempat yang kerap menimbulkan kebakaran, jati kemudian menjadi spesies dominan di wilayah tersebut. ▲



Jebara dan Rembang Pusat Galangan Kapal VOC

Menurut sifat-sifat kayunya, di Pulau Jawa orang mengenal beberapa jenis jati lengo atau jatimalam, memiliki kayu yang keras, berat, terasa halus bila diraba dan seperti mengandung minyak (Jw.: lengo, minyak; malam, lilin). Berwarna gelap, banyak berbercak dan bergaris. jati sungu, berwarna hitam, padat dan berat (Jw.: sungu, tanduk). Jati werut, dengan kayu yang keras dan serat berombak. Jati doreng, berkayu sangat keras dengan warna loreng-loreng hitam menyala, sangat indah. Jati kapur, kayunya berwarna keputih-putihan karena mengandung banyak kapur. Tetapi kelemahan jati yang satu ini kurang kuat dan kurang awet.

Kayu jati merupakan jensi kayu istimewa. Jika dirunut kualitasnya, kayu ini jelas masuk kelas satu. Karena memiliki kelebihan dalam kekuatan, keawetan dan keindahannya. Secara teknis, kayu jati memiliki kelas kekuatan I dan kelas keawetan I. Kayu ini juga sangat tahan terhadap serangan rayap. Sehingga dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama. Wajar jika jati terkadang dipergunakan untuk bahan mebel, pintu, jendela dan peralatan lain yang membutuhkan kekuatan bahan kayu nomor satu.

Kekuatan jati memang telah lama dikenal. Bukan hanya sebagai bahan pembuat peralatan rumah tangga, tetapi juga untuk bahan dok pelabuhan, bantalan rel, jembatan, kapal niaga dan kapal perang. Begitu kuatnya jati

ini, bahkan mampu menghantam baja. Konon, kapal marinir Inggris di masa lampau tidak mau “berurusan” dengan kapal jung Tiongkok yang terbuat dari jati ini, hanya karena khawatir terbentur.

Kayu jati sudah sejak lama digunakan sebagai bahan baku pembuatan kapal laut, termasuk kapal-kapal VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie, Kompeni Hindia Timur Belanda) yang melayari samudera di abad ke-17. Juga dalam konstruksi berat seperti jembatan dan bantalan rel. Selain itu, jati digunakan dalam membangun kapal-kapal niaga dan kapal-kapal perang. Beberapa daerah yang berdekatan dengan hutan jati di pantai utara Jawa pun pernah menjadi pusat galangan kapal, seperti Tegal, Juwana, Tuban, dan Pasuruan. Namun, galang kapal terbesar dan paling kenal berada di Jebara dan Rembang, sebagaimana dicatat oleh petualang Tomé Pires pada awal abad ke-16.

Jika sebelumnya pihak VOC sibuk “jualan” rempah-rempah, tetapi akhirnya keuntungan yang luar biasa dari perdagangan jati ternyata jauh mempesona. Begitu “menggodanya” si jati ini, sehingga VOC bahkan nekad mendirikan loji pertama mereka di Pulau Jawa —tepatnya di Jebara— pada 1651. Bahkan VOC juga memperjuangkan izin berdagang jati melalui Semarang, Jebara, dan Surabaya. Sekitar pertengahan abad ke-18, VOC telah mampu menebang jati secara lebih modern. Dan, sebagai imbalan bantuan militer mereka kepada Kerajaan Mataram di awal abad ke-19,

VOC juga diberikan izin untuk menebang lahan hutan jati yang luas.

Selanjutnya dari kegiatan ini, VOC lantas mewajibkan para pemuka bumiputera untuk menyerahkan kayu jati kepada VOC dalam jumlah tertentu yang besar. Melalui sistem blandong, para pemuka bumiputera ini membebaskan penebangan kepada rakyat di sekitar hutan. Sebagai imbalannya, rakyat dibebaskan dari kewajiban pajak lain. Jadi, sistem blandong tersebut merupakan sebetuk kerja paksa.

Pada masa itu, VOC kemudian memboyong pulang gelondongan jati Jawa ke Amsterdam dan Rotterdam. Kedua kota pelabuhan terakhir ini pun berkembang menjadi pusat-pusat industri kapal kelas dunia. Sementara di pantai utara Jawa, galangan-galangan kapal Jebara dan Rembang tetap sibuk hingga pertengahan abad ke-19. Mereka gulung tikar hanya setelah banyak pengusaha perkapalan keturunan Arab lebih memilih tinggal di Surabaya. Lagipula, saat itu kapal lebih banyak dibuat dari logam dan tidak banyak bergantung pada bahan dari jenis kayu lagi.

Tetapi dalam industri kayu saat ini, jati diolah menjadi venir (veneer) untuk melapisi wajah kayu lapis mahal; serta dijadikan keping-keping parket (parquet) penutup lantai. Selain itu juga diekspor ke mancanegara dalam bentuk furniture luar-rumah. Kayu jati mengandung semacam minyak dan endapan di dalam sel-sel kayunya, sehingga dapat awet digunakan di tempat terbuka meski tanpa divernis; apalagi bila dipakai di bawah naungan atap.

Sebagian besar kebutuhan kayu jati dunia saat ini dipasok dari Indonesia dan Myanmar. Jati Burma sedikit lebih kuat dibandingkan jati Jawa. Tetapi di Indonesia, jati Jawa tetap menjadi primadona. Tekstur jati Jawa lebih halus dan kayunya lebih kuat dibandingkan jati dari daerah lain di negeri ini. Produk-produk ekspor yang disebut berbahan Jawa teak (jati Jawa, khususnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur) sangat terkenal dan diburu para kolektor di luar negeri. Karenanya, harga produk ini pun begitu menjulang tinggi. ▲

Meski saat ini beragam komoditas luluhan lantak dihantam gelombang resesi ekonomi, tetapi nampaknya nasib berbeda dialami kopi. Bertahan dari gempuran krisis global, bahkan tak mampu membuatnya mental apalagi bernasib sial. Justru harga komoditas ini diprediksi akan semakin memperlihatkan “kuatannya”

Harga Kopi Diprediksi Tetap Tinggi



Biar pun keadaan sulit, tetapi permintaan akan kopi tidak pernah sedikit. Berdasarkan laporan dari International Coffee Organization (ICO), volume ekspor kopi Maret lalu melaju kencang. Sekitar 9,33 juta kantung. Bandingkan jumlah ini pada periode yang sama tahun lalu yang hanya 8,87 juta kantung. Sementara berdasarkan tahun kalender kopi, volume ekspor 6 bulan pertama 2008/2009 yang dihitung dari Oktober hingga Maret ternyata menunjukkan peningkatan sebesar 4,9 persen atau menjadi 48,9 juta ton kantung. Jauh meningkatkan dari pengiriman sebelumnya yang tidak lebih dari 46,6 juta ton.

Harga kopi di perdagangan dunia pun terlihat terus meroket sempurna. Hal ini menunjukkan jika permintaan kopi seakan tidak pernah mati. Bahkan diprediksi banyak pihak tidak akan pernah tersungkur seperti nasib apes yang dialami beberapa komoditas lainnya. Kontrak kopi jenis arabika untuk pengiriman Juli pada 22 Mei lalu di perdagangan

New York, beranjak sekitar 0,2 persen menjadi 1,36 dolar AS per pound. Bahkan pada perdagangan sebelumnya bahkan sempat mampu menggapai level tertinggi untuk kontrak perdagangan teraktif sejak 26 September, yakni, 1,37 dolar AS per pound. Bahkan di bursa komoditas London, harga kopi sempat melonjak 5 dolar AS per ton menjadi 1.521 dolar AS per ton.

Melesatnya harga kopi, sempat terpicu dari kemerosotan kurs dolar AS yang mendongkrak investasi di sector komoditas. Selain itu, juga ada pengaruh dari berkurangnya pasokan kopi dari Amerika Latin yang menggerus stok kopi dunia. ICE Futures AS juga mengungkapkan jika stok kopi dunia sejak awal tahun 2008 telah melorot sekitar 14 persen. Dan menurut Vice President Institutional Sales, Newedge USA LLC di New York, Rodrigo Costa, volume penjualan kopi yang rendah karena adanya pengetatan pasokan dari kawasan Amerika Tengah, Kolombia dan Brasil. Dan pasar belum memperoleh suplai dari panen kopi yang baru.

Sementara itu, Divisi Pembinaan Mutu Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), Saimi Saleh, mengungkapkan jika saat ini justru sedang terjadi permintaan akan kopi. Daya saing kopi Indonesia menurutnya masih terbentur dengan kemampuan produksi. Padahal Jakarta sebenarnya mampu untuk meningkatkan volume produksi dari hanya ratusan ribu ton menjadi 4 juta ton per tahun. Dalam penilaiannya, Indonesia juga mampu memproduksi 1 juta ton untuk jenis kopi arabika. Total produksi kopi tanah air per tahunnya tak lebih 700 ribu ton, dengan sumbangan sebesar 10 hingga 15 persen dari kopi arabika.

Peningkatan harga kopi local juga diiringi dengan melesatnya volume ekspor. Kopi jenis arabika dalam 12 bulan (dihitung hingga Maret), mencapai 63,4 juta kantung. Jauh dari jumlah tahun sebelumnya yang hanya 62,5 juta kantong saja. Sementara volume ekspor robusta juga melonjak dari 33,3 juta kantung menjadi 62,5 juta kantung. Sebagai salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia, kopi Indonesia juga terkenal dengan kopi berkualitas “khas” tanah air. Seperti kopi Jawa, kopi Sumatra, kopi Toraja, kopi Flores dan kopi Bali. ▲

Harga Emas Meroket Tajam

Meroketnya harga emas memang begitu terasa. Juni ini, harga emas kokoh di level 958,5 dolar AS per ounce. Dimana 1 ounce sama dengan 28,35 gram. Bahkan sampai akhir Mei lalu harganya bertengger dikisaran 950 dolar AS – 960 dolar AS per ounce. Bahkan pada 20 Februari, harga emas mencapai US\$1006,29 per ounce. Sedangkan rekor tertinggi sekitar US\$1.033,9 per ounce yang terjadi pada 17 Maret 2008 lalu.

Hal ini tentu menunjukkan, terjadi suatu tingkat harga yang melaju kuat dan sempurna. Melemahnya nilai tukar dolar AS memang dituding menjadi pemicu membengkaknya harga emas. Sebagai instrumen lindung nilai yang aman terhadap gencetan inflasi, tentu emas kemudian menjadi investasi terpilih. Meski berinvestasi dalam bentuk ini juga berdampak menanggung risiko yang relatif tinggi, tetapi melemahnya pasar saham dinilai mampu tetap memupuk “kecintaan” investor akan emas.

Berdasarkan laporan World Gold Council (Dewan Emas Dunia), diperkirakan volume pembelian emas melesat sebesar 38 persen pada kuartal I/2009 menjadi 1.016 ton. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar 733,9 ton, tentu ini suatu prestasi yang luar biasa. Dan memang diakui, menggelembungnya permintaan untuk emas ini tidak terlepas dari upaya lindung nilai.

Nilai permintaan emas secara global tercatat juga melonjak sekitar 36 persen menjadi sekitar US\$29,7 miliar pada kuartal I/2009. Dan kemudian menjadi kasus pertama sejak 2004, fakta yang mengungkap jika volume permintaan untuk kebutuhan investasi ini bahkan jauh lebih tinggi dari pemenuhan kebutuhan untuk pembuatan perhiasan. Dan euphoria emas ini diprediksi bahkan bertahan mengingat harga emas juga diperkirakan mampu terus bercokol di posisi yang semakin tinggi. ▲

Minyak Asia Dekati Level US\$72 per Barel

Harga minyak menguat di perdagangan Asia, menyusul perkiraan penurunan cadangan minyak mentah Amerika Serikat, kata para analis. Kontrak berjangka utama New York, minyak mentah “light sweet” untuk pengiriman Juli, naik 57 sen menjadi US\$ 71,90. Level harga ini merupakan posisi tertinggi dalam delapan bulan belakangan. Minyak mentah “Brent North Sea” untuk penyerahan Juli, 2009 juga mengalami kenaikan 45 sen menjadi US\$71,25 per barel.

sementara itu pemerintah Amerika, mengatakan, bahwa persediaan minyak mentah Amerika jatuh 4,4 juta barel dalam pekan yang berakhir 5 Juni, jauh lebih besar daripada ekspektasi pasar turun 700.000 barel. Harga minyak juga terpicu oleh menurunnya dolar AS karena para investor terdorong oleh harapan ekonomi global akan berbalik naik (rebound), yang membuang greenback dan beralih kepada mata uang yang memberikan imbal hasil, (yield) lebih baik.

Minyak mentah yang dihargakan dalam dolar menjadi lebih murah untuk para pembeli yang memegang mata uang kuat. Kecenderungan itu menstimulus permintaan



dan mendorong harga minyak naik.

Para analis dari National Australia Bank mengatakan, melemahnya dolar Amerika memberikan kekuatan daya beli besar bagi para investor asing dan meningkatkan permintaan untuk aset-aset riil, seperti minyak untuk melindungi terhadap inflasi. “Pertimbangan semua itu, tampak bahwa harga minyak adalah perdagangan saat ini pada sebuah harga sesuai dengan fundamental pasar, memperlihatkan lebih kepada aktivitas dari para investor dengan depresiasi dolar AS danantisipasi `rebound` yang relatif cepat dalam pertumbuhan ekonomi global,” kata mereka. ▲

Permintaan Kakao Meningkat, Pengolahan Tersendat

Permintaan pasar dunia terhadap kakao semakin meningkat. Peningkatan tersebut pertahunnya antara 2 hingga 4 persen atau setara dengan 60 ribu hingga 120 ribu ton per tahun. Sebagai negara produsen kakao terbesar kedua di dunia, memang banyak negara yang menggantungkan kebutuhan kakao mereka dengan Indonesia. Termasuk negara serumpun kita, Malaysia.

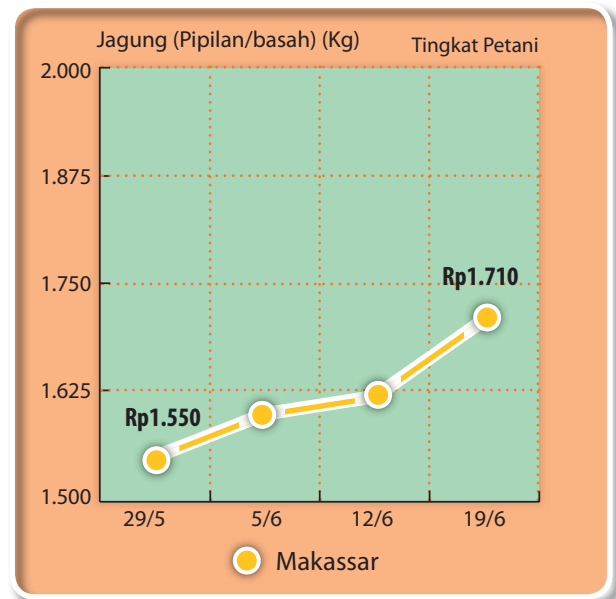
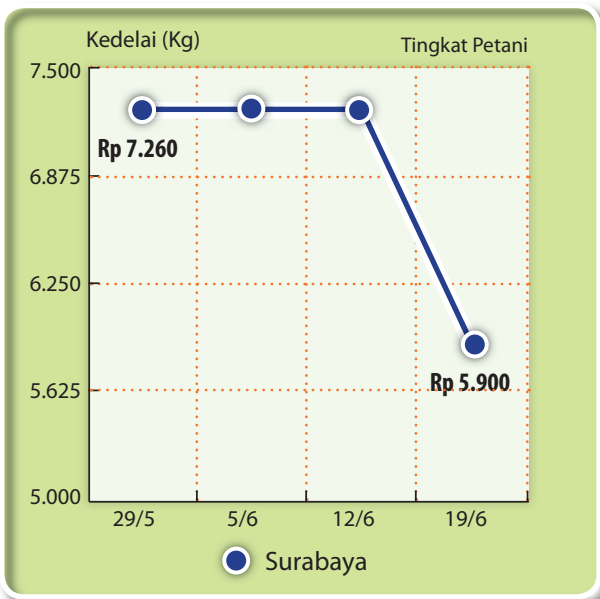
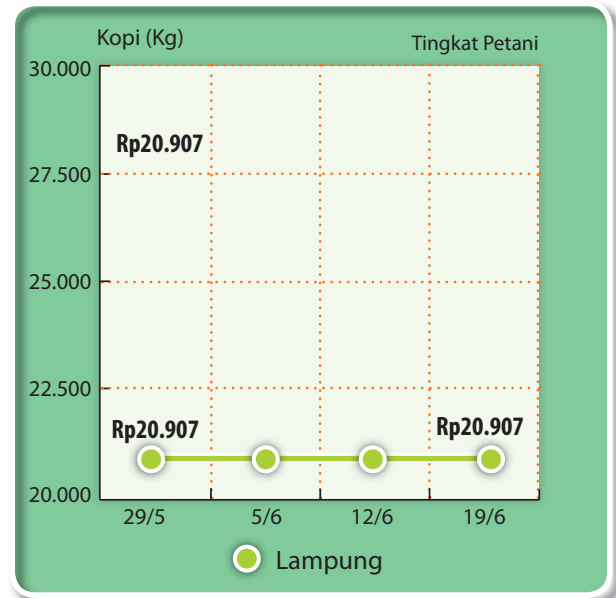
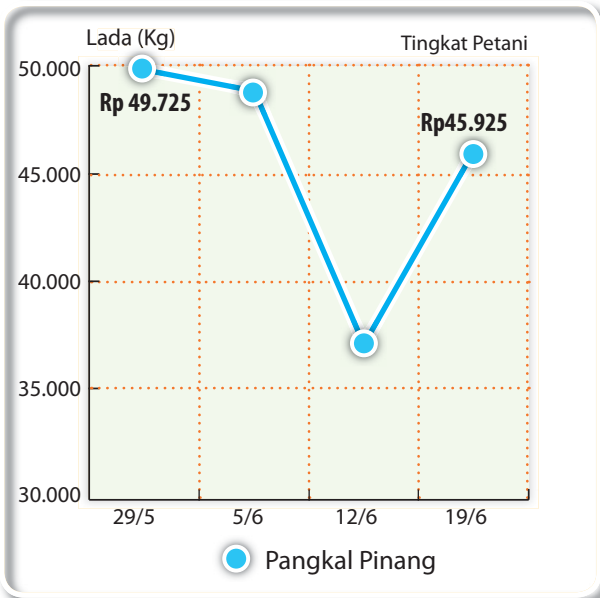
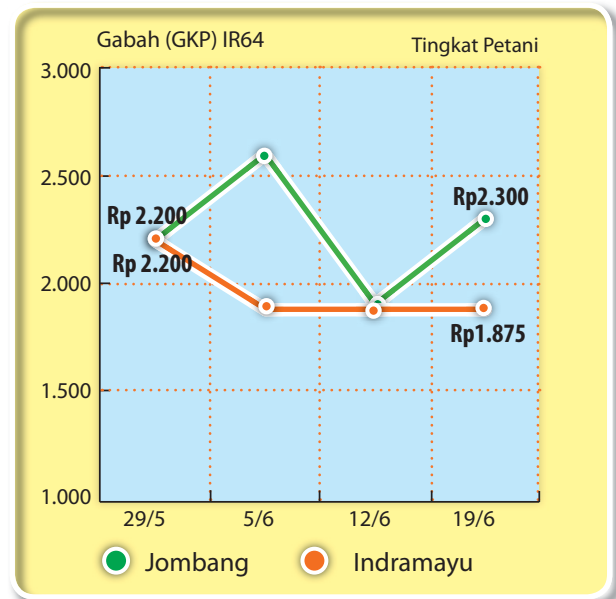
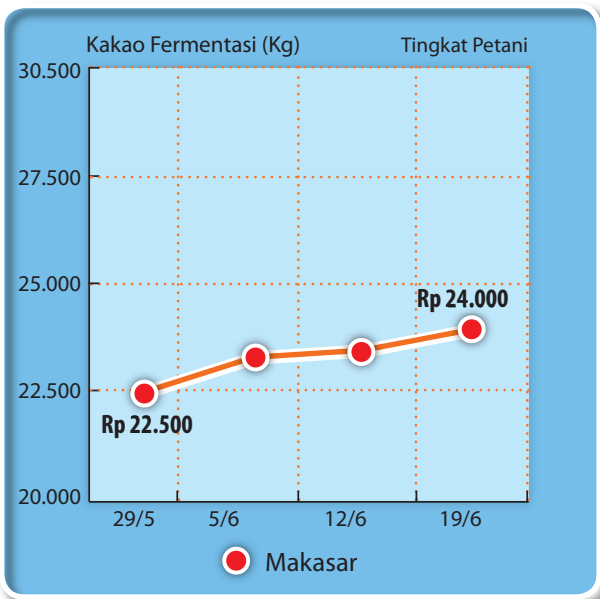
Di negeri jiran ini, ternyata membutuhkan sebesar 60 persen kakao Indonesia. Kebutuhan ini untuk bahan baku kakao bubuk, yang ironisnya justru akan “dilemparkan” kembali sekitar 7 ribu ton atau senilai 10 juta dolar AS ke Indonesia dalam bentuk produk eskpor. Dan bukan hanya Malaysia yang melakukan hal seperti ini terhadap Indonesia. Dalam kenyataannya, untuk urusan industri pengolahan kakao kita memang masih ketinggalan.

Demi menumbuhkan industri pengolahan kakao tanah air, maka dilakukan upaya penerapan bea keluar dan mendorong implementasi kewajiban fermentasi kakao. Untuk urusan kualitas biji kakao, produk lokal memang dinilai rendah dan tidak melewati proses fermentasi. Akibatnya produk kakao Indonesia gagal bersaing di pasar dunia terutama untuk kelas premium.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Coklat Indonesia (APIKCI), Sonny Satari, petani lokal memang belum banyak yang menerapkan proses fermentasi untuk meningkatkan kualitas biji kakao. Hal ini terjadi karena petani terbentur tentang biaya yang lumayan tinggi untuk melakukan proses yang dapat menghasilkan bentuk kakao menjadi lebih bagus dan harum. Selain urusan kualitas, komoditas ini juga tersandung masalah rendahnya produktivitas yang hanya 0,6 ton per hektar setiap tahunnya.

Penerapan bea keluar (BK) terhadap biji kakao ekspor juga sedang direncanakan pemerintah. Sehingga diharapkan mampu menggenjot pertumbuhan industri kakao nasional, selain juga agar ekspor tidak hanya dalam bentuk biji. Menurut Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian Achmad Mangga Barani, Deptan dan departemen terkait masih memperhitungkan mengenai besaran BK yang akan diterapkan. Dana yang terkumpul dari penerapan BK rencananya juga ditujukan untuk membantu para petani kakao dalam upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas kakao. Juga untuk biaya program revitalisasi perkebunan dan gerakan nasional produksi kakao, dimana sebelumnya Mentan telah mencanangkan 2 juta ton biji kakao untuk tahun 2020. ▲

Harga Komoditi Tingkat Petani



Aturan Main Pasar Lelang Forward

Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak jual beli di Pasar Lelang wajib diupayakan terlebih dahulu dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka para pihak wajib menggunakan sarana mediasi atau konsiliasi yang disediakan oleh Penyelenggara Pasar Lelang. Sedangkan apabila upaya ini juga tidak tercapai mufakat, maka masalahnya wajib diselesaikan melalui badan arbitrase.



Untuk itu, penyelenggara Pasar Lelang harus membentuk Komite Arbitrase yang memfasilitasi penyelesaian melalui arbitrase. Komite Arbitrase menyiapkan Daftar Arbiter yang akan menjadi anggota Panel Arbitrase. Untuk dapat diangkat menjadi anggota panel Arbiter, calon anggota wajib memahami sistem dan mekanisme operasional Pasar Lelang, permasalahan komoditi dan penyelesaian transaksinya. Setiap Panel Arbitrase berjumlah ganjil, terdiri dari minimal 3 orang Arbiter. Masing-masing pihak yang berselisih memilih seorang dan kemudian kedua Arbiter tersebut kemudian memilih seorang Arbiter ketiga sebagai ketua.

Apabila dalam jangka waktu 5 hari, kedua Arbiter belum sepakat memilih Arbiter ketiga sebagai ketua, maka Penyelenggara Pasar Lelang berhak menunjuk Arbiter ketiga dimaksud. Dalam hal salah satu pihak tidak menunjuk seorang

Arbiter, dianggap yang bersangkutan menyerahkan penunjukan Arbiter kepada Penyelenggara Pasar Lelang. Apabila para pihak yang bersangkutan tidak menunjuk Arbiter, maka Penyelenggara Pasar Lelang akan menunjuk 3 orang Arbiter dan salah satu diantaranya diangkat menjadi Ketua.

Apabila salah satu pihak mempunyai keberatan terhadap seorang atau lebih Arbiter, maka ia diwajibkan mengajukan alasannya dan apabila alasan tersebut diterima, Penyelenggara Pasar Lelang berhak menunjuk Arbiter lainnya. Komite Arbitrase menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan arbitrase.

Setiap permohonan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, diajukan kepada Komite Arbitrase dan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Komite Arbitrase. Tindakan permohonan harus segera disampaikan Komite Arbitrase kepada pihak lawan yang berselisih setelah dilakukan pembayaran biaya

administrasi sebagaimana dimaksud, untuk ditanggapi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja dengan menyebutkan Arbiter yang dipilihnya. Setiap permohonan penyelesaian perselisihan wajib diajukan secara tertulis kepada Komite Arbitrase selambat-lambatnya 7 hari setelah tidak tercapainya upaya mediasi atau konsiliasi. Komite Arbitrase meneliti kelengkapan dokumen permohonan penyelesaian perselisihan. Dalam hal seluruh dokumen sudah lengkap, Komite Arbitrase menyerahkan berkas permohonan penyelesaian perselisihan kepada Panel Arbitrase untuk diproses lebih lanjut. Keputusan Arbitrase bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dimintakan banding.

Pelanggaran dan sanksi

Pelanggaran terhadap semua ketentuan/Peraturan Tata Tertib Pasar Lelang dapat diklasifikasikan dalam pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Yang termasuk dalam pelanggaran ringan ialah bertindak tidak sesuai dengan norma-

norma yang lazim dalam perdagangan; melakukan kegiatan yang cenderung dapat merusak martabat atau nama baik Pasar Lelang; melakukan pelanggaran administrasi yang berlaku di Pasar Lelang. Yang termasuk dalam pelanggaran berat adalah



secara sadar berkelompok untuk mengadakan transaksi yang telah disepakati lebih dahulu; membuat atau melaporkan transaksi palsu atau fiktif; melakukan pemerasan atau mencoba memeras terhadap Anggota Pasar Lelang lainnya atau prinsipalnya; memanipulasi harga atau mencoba memanipulasi harga untuk menyudutkan pasar; membuat dengan sengaja pernyataan tertulis atau informasi yang tidak benar kepada Penyelenggara Pasar Lelang atau Badan lainnya yang berkaitan dengan Pasar Lelang; dengan sadar menyebarkan laporan palsu mengenai kondisi persediaan komoditi atau keadaan pasar yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi suatu komoditi di Pasar Lelang; membeli atau menjual suatu komoditi dengan maksud untuk mengacaukan transaksi pembelian atau penjualan dalam

Pasar Lelang

Bagi pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran

ringan akan dikenakan peringatan secara tertulis maksimum 2 (dua) kali, dan atas pelanggaran selanjutnya akan dikenakan sanksi pembekuan Keanggotaan yang tidak melebihi 6 bulan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Bagi pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat, maka atas setiap pelanggaran dapat dikenakan sanksi yaitu pemberhentian Keanggotaan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Ketentuan mengenai pengenaan denda akan diatur lebih lanjut oleh Penyelenggara Pasar Lelang.

Tata cara penentuan terjadinya pelanggaran dilakukan oleh Penyelenggara Pasar Lelang dan/atau pihak lain yang ditunjuknya dengan mengadakan penelitian terhadap kasus yang diketahui atau diduga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Pasar Lelang, baik atas inisiatif sendiri maupun atas pengaduan pihak yang berkepentingan.

Apabila terdapat petunjuk bahwa memang telah terjadi pelanggaran, maka Penyelenggara Pasar Lelang dapat melakukan pengusutan lebih lanjut terhadap Anggota Pasar Lelang yang melanggar. Anggota Pasar Lelang tersebut, dan/atau Anggota Pasar Lelang lainnya yang tersangkut, diperiksa pembukuannya maupun catatan-catatannya serta diminta dokumen-dokumen yang dianggap perlu menyangkut masalah tersebut, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan investigasi. Kemudian dibuat Iktisar hasil pemeriksaan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Penyelenggara Pasar Lelang.

Pada tahap awal, Pasar Lelang diselenggarakan oleh dinas/institusi Provinsi, Kota, Kabupaten yang bertanggung jawab di bidang perdagangan komoditi agro. Dengan berlakunya Peraturan Tata Tertib

ini, semua peraturan mengenai pelaksanaan pasar lelang komoditi agro yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Tata Tertib ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib atau selama belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini.

Penomoran keanggotaan pasar lelang komoditi agro didasarkan oleh kode wilayah Propinsi / Kabupaten / Kota, diambil dari kode area telpon, contohnya Bandung dengan kode 022, Bogor dengan kode 251 (nol dihilangkan). Apabila dalam satu wilayah lebih dari satu lokasi pasar lelang (kalau kode telepon berbeda, maka yang dipakai adalah 3 digit diatas). Bentuk Usaha diberi kode 1, perseorangan (petani / produsen) dengan kode 2, kelompok Tani / Usaha dengan kode 3, Koperasi 4, pabrikan 5, eksportir 6, perantara perdagangan 7, pasar swalayan 8. Kode seterusnya berupa nomor urut anggota yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang sesuai dengan urutan pendaftarannya. Contohnya, anggota Pasar Lelang Komoditi Agro Bandung, Jawa Barat yang memiliki bentuk usaha sebagai Koperasi dengan nomor urut anggota 020, akan memperoleh Nomor Anggota 022 1 3 020 4 20. Penjelasan adalah, Kode 022 Bandung, Propinsi Jawa Barat 1, Penyelenggara Pasar Lelang Komoditi Agro di Bandung 3, bentuk usaha sebagai Koperasi 020, Nomor urut pendaftaran anggota dengan urutan ke 20.

Transaksi jual beli komoditi yang dilaksanakan dalam pasar lelang dimulai dengan informasi tentang komoditi. Informasi ini didapat dari pihak penjual dan sebagian diverifikasi oleh penyelenggara lelang, diantaranya informasi tersebut mencakup nama komoditi, jenis, kualitas, asal komoditi, harga satuan, volume, satuan, nilai transaksi, kemasan, tempat penyerahan, waktu penyerahan, dan tanggal. ▲ *Selesai*

Recession's End Won't Make Investing Easier

After all the blood, tears and recriminations, is the Great Recession over?

Jane Bryant Quinn

A leading personal finance writer and author of "Smart and Simple Financial Strategies for Busy People," is a Bloomberg News columnist. She is a director of Bloomberg LP, parent of Bloomberg News. The opinions expressed are her own.

"Not yet, but sooner than you think," says economist Lakshman Achuthan, managing director of the Economic Cycle Research Institute in New York City. Only a small amount of government stimulus has reached the economy so far, but "the business cycle doesn't wait for policy makers," Achuthan says.

ECRI's U.S. Long Leading and Weekly Leading indexes are up significantly from their December lows. In 16 of the past 17 downturns, this sequence of upturns has correctly forecast a recovery in about four months. (The exception: 1930, so there's something in the record for pessimists, too.)

If growth does resume, you can thank the government's massive policy response.

The Federal Reserve slashed the federal funds rate from 5.25 percent in August 2007 to 0.25 percent today. (That's the rate banks charge for lending money to each other overnight.) The Treasury Department, for all the abuse it has taken in two administrations, saved the banking system from collapse. The stimulus package is boosting the natural,

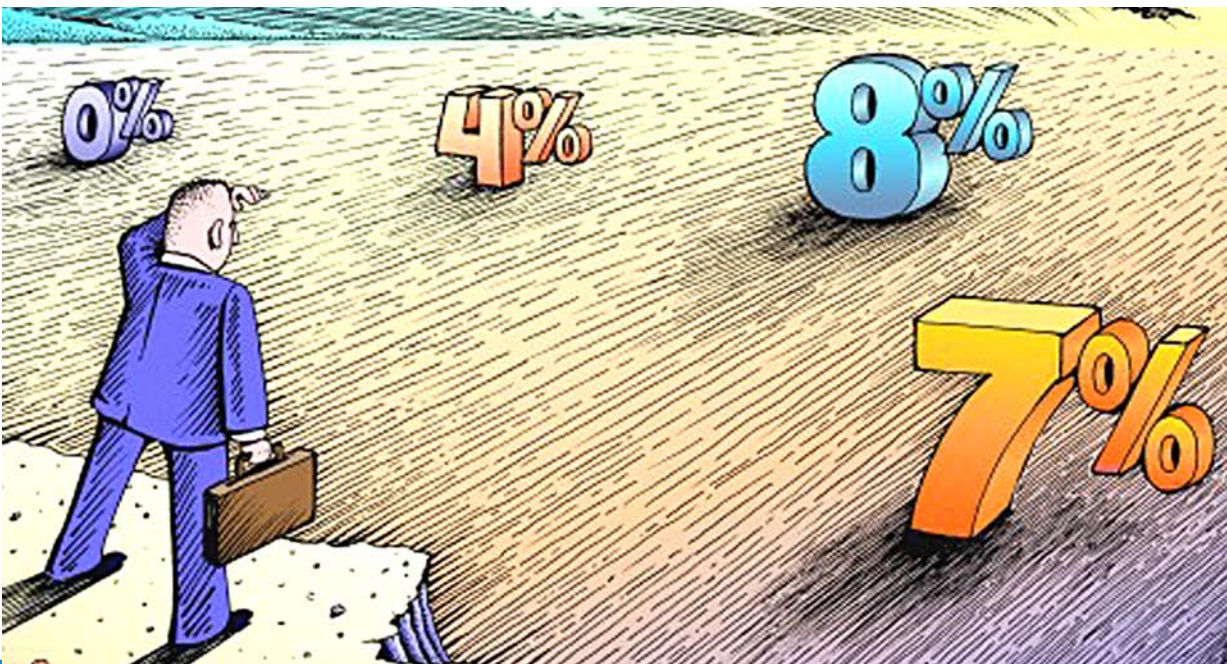
cyclical forces that bring recessions to an end.

These efforts in the U.S. have been mirrored everywhere in the industrial and developing world. No one is saying that the economy will return to robust health anytime soon. At the very least, however, businesses might begin to rebuild their depleted inventories. That would give manufacturing a better tone and, perhaps, create new jobs. Construction spending also starts up before a recession ends.

Alternatively, another financial accident might freeze credit again, and we would be back in the pits. Even a recovery might come too late for investors nearing retirement age whose investments are toast.

Impact on Investors

The big question about investors and consumers is whether the recession has marked them in any way. Was the suddenness of the global breakdown so shocking, and the consequences so painful, that Americans will change their saving and spending habits permanently? Or will they shake off their fright and return to life as it was B.C. (Before Collapse)?



At the moment, financial planners report that their clients -- young and old -- are behaving more conservatively. Families are curbing spending, paying down debt, increasing their savings and investing cautiously. Call this strategy Plan B, the place you retreat to in the face of uncertainty and loss.

Even among baby-boomer millionaires, 50 percent intend to hold more of their retirement portfolios in cash, according to a survey conducted by the Spectrem Group, a Chicago consulting firm. Whether that intention survives a new bull market remains to be seen. It probably should -- if not in cash, then certainly in bonds.

Big Equity Bet

Odds are that you've been over-invested in equities. At the end of 2007, almost one in four workers between the ages of 56 and 65 held more than 90 percent of their 401(k) in stock, according to the Employee Benefit Research Institute in Washington. More than two in five held more than 70 percent in stock. They will be well into Social Security before recovering their losses.

Maybe these 401(k) holders

managed their risk by owning a bond portfolio on the side, but I doubt it. More likely, they're investing aggressively, in hope of making up for the fact that they started serious saving late. They gambled and lost. The market is no respecter of your personal need to make money in a hurry.

Continued Contributions

On the other end of the investment spectrum, younger and lower-paid employees with 401(k)s are doing better than you might think. Accounts worth less than \$10,000 grew an average of 40 percent in 2008, because workers continued making contributions. The new money they put into their plans more than covered the market loss.

If the recession is indeed near its end, stocks will continue trending up. But "the past may not be prologue," says market analyst Steve Leuthold of the Leuthold Group in Minneapolis. Future returns may lag behind the market's historical returns, he says, because of the mature state of the U.S. economy.

In general, growth in corporate earnings and gross domestic product are the primary factors

driving a nation's long-term stock market performance. Leuthold sees annual GDP rising in the 2 or 3 percent range, compared with 5 or 6 percent during America's days of emerging growth and global leadership.

Mature or Developing

Western Europe is also mature and, arguably, so is Japan. That leaves the developing countries in Asia, Latin America and Eastern Europe. You might have sworn off them, after they got clobbered last year. But they remain the parts of the world with the highest potential for growth. A Plan B investor will own them in moderation, balanced with safer investments such as quality bonds, including inflation-protected Treasuries.

If you lost your job or saw your income chopped, Plan B is the only way to go. For those still standing, the message is the same. There's a lot of struggle left in the economy and the global financial system. When we muddle out of this recession, the Fed will have to fight inflation, with unknowable results. The times call for more savings, less debt and a ready-for-anything investment mix. ▲

SRG Instrumen Kredit

Windy Erwindia Hasan

Ketua Umum Asosiasi
Bank Pembangunan Daerah,
Dirut BPD DKI Jakarta



Resi Gudang (*Warehouse Receipt*) merupakan salah satu instrumen penting, efektif dan negotiable (dapat diperdagangkan) serta swapped (dipertukarkan) dalam sistem pembiayaan perdagangan disuatu wilayah. Di samping itu, Resi Gudang juga dapat dipergunakan sebagai jaminan (*collateral*) atau diterima sebagai bukti penyerahan barang dalam rangka pemenuhan kontrak derivatif yang jatuh tempo, sebagaimana terjadi dalam suatu Kontrak Berjangka.

Melalui UU Nomor 9 Tahun 2006, tentang Sistem Resi Gudang, pemerintah berusaha untuk memberikan dan meningkatkan akses masyarakat terutama para petani dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) terhadap kepastian hukum, melindungi masyarakat dan

memperluas akses mereka untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan. Sistem resi gudang ini tidak saja membantu para petani dan pelaku usaha untuk mengakses kredit, tapi juga bisa menguntungkan perbankan itu sendiri, karena ada kepastian agunan dan kelayakan usaha.

Kebijakan ini juga diikuti dengan Kebijakan Bank Indonesia PBI 9/6/PBI/2007 terkait pengakuan aset sebagai surat berharga, yang berlaku sejak 2 April 2007. Dalam Pasal 46 huruf f: a.l. menyatakan bahwa Resi Gudang yang diikat dengan Hak Jaminan atas Resi Gudang, sebagai agunan, dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).

Peraturan-peraturan tersebut menjawab kebutuhan akan suatu

instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh petani dan kelompok tani, pelaku usaha kecil dan menengah termasuk perusahaan pengelola gudang, perusahaan pemberi pinjaman dan bank, untuk mengakses permodalan guna meningkatkan usahanya.

Penerapan Sistem Resi Gudang menawarkan serangkaian manfaat yang luas, bagi petani sendiri, dunia usaha, perbankan dan bagi pemerintah. Manfaat tersebut antara lain, keterkendalian dan kestabilan harga komoditi. Sistem ini bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar, melalui fasilitasi penjualan sepanjang tahun. Menahan jual saat sediaan melimpah dan harga tidak bagus. Keterjaminan modal produksi dan produktifitas. Pemilik komoditi mempunyai modal usaha untuk produksi berkelanjutan karena adanya pembiayaan dari lembaga keuangan. Jaminan produksi komoditi menjadi lebih pasti karena adanya jaminan modal usaha bagi produsen/petani. Keterkendalian sediaan (stock) nasional.

SRG juga mendukung terbangunnya kemampuan pemerintah untuk memantau dan

Penjamin Tanpa Risiko

menjaga ketahanan persediaan pangan, melalui jaringan data dan informasi terintegrasi yang terbangun. Keterpantauan lalu lintas produk/komoditi. Sistem ini juga membangun kemampuan pemerintah di pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas komoditi, upaya perlindungan konsumen, pengendalian ekosistem, pengendalian lalu lintas produk komoditi ilegal. Dan, keterjaminan bahan baku industri.

SRG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasaran dan sistem industri yang dikembangkan di negara-negara maju. Di negara-negara yang lebih maju, Resi Gudang telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi sektor agrobisnis dan agroindustri, karena baik produsen maupun sektor komersial terkait dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi untuk menjadi produk yang dapat diperjualbelikan secara luas. Keleluasaan penyaluran kredit bagi perbankan. Dunia perbankan nasional memperoleh manfaat dari terbentuknya pasar



bagi penyaluran kredit perbankan. Sistem resi gudang dibanyak negara dianggap sebagai instrumen penjamin kredit tanpa resiko. Efisiensi logistik dan distribusi. Sebagai surat berharga, Resi Gudang dapat dialihkan atau diperjualbelikan oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga, dipasar yang terorganisir (bursa) atau di luar bursa.

Dengan terjadinya pengalihan Resi Gudang tersebut, kepada Pemegang Resi Gudang yang baru, diberikan hak untuk mengambil barang sesuai dengan deskripsi yang tercantum di dalamnya. Dengan demikian

akan tercipta suatu sistem perdagangan yang lebih efisien dengan dihilangkannya komponen biaya pemindahan barang. Kontribusi fiskal. Melalui transaksi-transaksi Resi Gudang, Pemerintah memperoleh manfaat fiskal yang selama ini bersifat potensial. Dari sekedar sediaan barang di gudang menjadi fasilitas modal usaha.

Dengan *multiplier effect* yang begitu besar, tentunya tidak sepatutnya BPD sebagai andalan Pemerintah daerah berpangku tangan, dan tidak turut berpartisipasi dalam mengembangkan Kredit Resi Gudang ini. ▲

Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M.

PENGABDIAN TIDAK KENAL USIA



D I ranah hukum tanah air, oppung-kakek satu cucu ini, tak satu pun yang tidak kenal. Itu berkat ketekunan dan kecintaannya dengan disiplin ilmu hukum. Maka, selepas pengabdian yang panjang di jajaran birokrasi, Zen Purba, demikian dia disapa akrab oleh sahabat dan koleganya, tetap dipercaya menempati posisi penting dalam penegakan hukum.

Ketika *Buletin Berjangka*, berkesempatan berbincang dengan pria kelahiran Tebing Tinggi, Sumut, 18 Juli 1942, ini, terlontar satu pertanyaan pribadi yang dialamatkan padanya. Apa motivasi Zen Purba ketika menerima jabatan Ketua Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), dijelang usianya yang makin senja? Dengan bijak Zen Purba, menjawab, inilah panggilan jiwa. "Dalam pengabdian, tidak kenal usia. Dan, adalah kewajiban untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman."

Sosok Achmad Zen Umar Purba, tampak tegas, berwibawa dan sederhana. Dan agaknya, *figure* inilah yang diharapkan menjadi salah satu pilar yang dapat mengikis karang buruknya image perdagangan berjangka komoditi di tanah air. Dua tahun terakhir, image industri perdagangan berjangka komoditi memang sedang diuji, dari munculnya berbagai kasus praktik perdagangan ilegal.

Namun, sayangnya, sejak BAKTI didirikan 7 November 2008, belum satu pun pihak yang menjajal penyelesaian sengketa perdagangan berjangka lewat badan yang dikomandoi Zen Purba, itu. Menurutnyanya itu bisa disebabkan beberapa faktor. Diantaranya, masing-masing pihak di dalam dokumen investasi belum memilih atau menentukan, bila terjadi perselisihan perdagangan berjangka akan diselesaikan lewat BAKTI.

"Oleh karena itu, kami sudah mencoba melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada pelaku perdagangan berjangka, untuk

mengenal lebih dekat tentang BAKTI. Jadi sampai sekarang kita masih *nganggur*, belum pernah ada persidangan BAKTI," kata Zen.

Saat terpilih sebagai Ketua BAKTI, tak ada yang meragukan kemampuan pria ini. Karena, dia pun sudah punya pengalaman dibidang yang sama. Yakni, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

Bagi Zen, ilmu hukum sudah menjadi bagian hidupnya. Tahun 1974, dia berhasil menyelesaikan pendidikannya di Fak. Hukum Univ. Indonesia. Tidak puas sampai di situ, tahun 1979, dia pun melanjutkan menimba ilmu ke Amerika. Tepatnya di Harvard University. Dari universitas prestisius di dunia itu, dia pun kemudian berhasil meraih gelar *Magistri in Legibus* (LL.M). Bahkan, pada 7 Maret 2005, dia juga telah dinobatkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Indonesia. Memang, selain pernah berprofesi sebagai konsultan hukum dan birokrat, Zen juga menyempatkan waktunya sebagai seorang dosen di almahaternya itu.

Bagi Umar Zen Purba, ilmu hukum adalah segala-galanya. Betapa tidak, dia pun mempersunting seorang sarjana hukum, Yunizar. Bukan itu saja, putri semata wayangnya, Ayu Alisya Purba, juga ikut-ikutan mengikuti jejak orang tuanya. Wanita cantik ini, alumnus Fak. Hukum, Univ. Indonesia, tahun 2005.

Menguak sekelumit kisah hidup Zen Purba, tentu tidak hanya berbicara tentang dunia hukum saja. Setidaknya, pria berkaca mata ini juga sebelumnya sempat "nyasar" menggeluti profesi wartawan. Dia pernah menjabat sebagai editor hukum majalah berita mingguan, *Ekspress* tahun 1970, dan editor hukum majalah *Tempo* (1971-1979). Sempat 5 tahun dia menjalani karir sebagai wartawan sekaligus dosen di Univ. Indonesia. Meski kemudian profesi dosen tampak lebih diminatinya dan terus digelutinya sampai sekarang. Selain menjadi dosen, Zen juga pernah menjadi konsultan hukum di firma hukum Ali Budiardjo Nugroho pada tahun 1986. Dan sempat non aktif pada 1999-2002, karena dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), di Departemen Hukum dan HAM.

Meski memiliki kemampuan yang luar biasa dibidang hukum, tetapi Zen bukan sosok yang haus akan kuasa. Karena begitu mencintai profesi sebagai dosen, dia bahkan memilih mundur dari pencalonan sebagai hakim agung. Padahal, namanya sudah tercatat sebagai calon hakim agung. Bagi Zen, pengunduran sebagai calon hakim agung itu didedikasikan untuk berkonsentrasi di dunia pendidikan. Meski diakuiinya, sebagai guru besar gajinya tak lebih dari gaji wartawan muda. ▲